

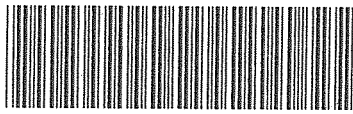
# PROSIDING

Seminar  
**KELUARGA MENYONGSONG ABAD 21  
DAN PERANANNYA DALAM PENGEMBANGAN  
SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA**

diselenggarakan dalam rangka  
*Mengisi Hari Keluarga Nasional 1993  
dan Menyongsong Tahun Keluarga Internasional 1994*

Bogor, 21-22 September 1993

Editor :  
Sri Rihati Kusno  
Drajat Martianto  
Esilia Meti Dwiriani  
Diah K. Pranadji  
Lilik K. Hartoyo



IPB20010557

Kerjasama  
**JURUSAN GIZI MASYARAKAT DAN SUMBERDAYA KELUARGA  
FAKULTAS PERTANIAN - INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
dengan  
**BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

## KATA PENGANTAR

Tema sentral Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, dianggap sebagai wahana pembangunan bangsa. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia secara dini dapat dimulai dari unit keluarga ini. Di sisi lain, seiring dengan pertumbuhan pembangunan di berbagai bidang yang berlangsung dengan cepat, keluarga di Indonesia juga mengalami transformasi sosial budaya. Transformasi ini dapat mempengaruhi kemampuan keluarga dalam menyalurkan fungsinya sebagai wahana pembangunan bangsa. Dengan demikian berbagai pemikiran sangat diperlukan untuk mencegah agar laju pertumbuhan pembangunan yang cepat tidak membawa dampak negatif terhadap kehidupan keluarga, tetapi justru dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk menghimpun berbagai pemikiran itulah seminar ini diselenggarakan. Disamping itu penyelenggaraan seminar ini juga dimaksudkan untuk *Mengisi Hari Keluarga Nasional Tahun 1993 serta Tahun Keluarga Internasional Tahun 1994*.

Prosiding ini disusun dengan maksud untuk menyebarluaskan hasil seminar, yang kami harap akan sangat bermanfaat bagi para pembaca atau berbagai pihak yang membutuhkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atas segala bantuan dan kerjasama dalam penyelenggaraan seminar ini. Kepada Dr.Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc., dan kepada Ir. Ikeu Tanziha, MS., kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan prosiding ini. Demikian juga kepada Sdr. Adih Maryadi Lesmana atas kesabarannya mengetik naskah prosiding ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya sekali lagi kami berharap bahwa prosiding ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bogor, Februari 1994

Tim Editor

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
SUSUNAN ACARA SEMINAR .....	iv
RUMUSAN HASIL SEMINAR .....	vi
LAPORAN KETUA PANITIA .....	xi
SAMBUTAN REKTOR IPB .....	xiii
PIDATO PENGARAHAN MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN/Ketua BKKBN .....	xvi
PIDATO PENGARAHAN MENTERI NEGARA URUSAN PERANAN WANITA .....	xxv
 MAKALAH SEMINAR	
1. Makalah Utama : Pemahaman Arti Sumber- daya Manusia pada PJP II dan Repelita VI ( <i>Prof.Dr. Soekirman, Deputi SDM BAPPENAS</i> ) .....	1
2. Transisi Keluarga di Indonesia : Perspektif Global ( <i>Dr. Sri Harijati Hatmadji, Evi Nurvidya Anwar, LD-UI</i> ) .....	6
3. Keluarga dan Peningkatan Kualitas Sumber- daya Manusia Dalam Rangka Menyongsong Abad ke 21 ( <i>Dr.Ir. Ratna Megawangi, GMSK Faperta IPB</i> ) .....	29
4. Peranan Keluarga Dalam Proses Modernisasi dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya ( <i>Prof.Dr. Saparinah Sadli, Fakultas Psi- kologi UI</i> ) .....	47
5. Peran Agama Dalam Era Globalisasi dan Modernisasi serta Kaitannya Dengan Ketahanan dan Peranan Keluarga : Sudut Pandang Agama Islam ( <i>Ir. Haidar Bagir, MA. Harian Umum REPUBLIKA ; Tanpa Makalah</i> )	

6.	Peran Agama Dalam Era Globalisasi dan Modernisasi serta Kaitannya Dengan Ketahanan dan Peranan Keluarga : Sudut Pandang Agama Kristen (Dr. Alex Paat, STF Driyarkara) .....	59
7.	Penerapan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Dalam Era Globalisasi (Dr. Kartono Muhammad, PKBI) .....	69
8.	Beberapa Aspek Dalam Kesejahteraan Keluarga (Dr.Ir. Hidayat Syarief, MS., Karo Pendidikan, Agama, Pemuda dan Olahraga, BAPPENAS) dan (Ir. Hartoyo, MS. (GMSK, Faperta IPB) .....	73
9.	Program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Masyarakat Indonesia (Drs. Benny A. Kodyat, MPA., Direktorat Gizi, DepKes RI) .....	80
10.	Program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Ir. Sugiah M. Mahfud, MS. dan Ir. Sarwititi S. Agung, MS., PSW-IPB) .....	98
11.	Perkembangan Keluarga Dalam Pembangunan Berkelanjutan : Suatu Analisis Tenaga Kerja Wanita dan Permasalahannya Dalam Masyarakat Indonesia (Prof.Dr.Ir. Pudjiwati Sajogyo, PSW-IPB) .....	112
12.	Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Dra. Sjamsiah Achmad, MA., Asmen Bidang Pendidikan Wanita, Kantor Meneg UPW) .....	120
13.	Interaksi Antar Keluarga dan Rumah tangga (Prof.Dr. Selo Sumardjan, FISIP UI) .....	127
	HASIL DISKUSI .....	140
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	159

**SUSUNAN ACARA SEMINAR  
KELUARGA MENYONGSONG ABAD XXI DAN PERANANNYA  
DALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA**

21 September 1993

08.00 - 09.00 Pendaftaran Ulang

**SESI 1**

09.00 - 09.10 Laporan Ketua Panitia

09.10 - 09.20 Sambutan Rektor IPB, dilanjutkan Pembukaan

09.20 - 09.50 Pidato Pengarahan Menteri Negara Kependudukan dan Keluarga Berencana, RI  
*"Arah Kebijakan Kependudukan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Manusia dan Kesejahteraan Keluarga"*. Disampaikan oleh Asisten MENPENDUDUK,  
(Prof. Dr. Yaumul C. Agus Achir)

09.50 - 10.10 Rehat Kopi

10.10 - 10.40 Makalah Utama *"Pemahaman Arti Sumberdaya Manusia pada PJP II dan Repelita VI"* (Prof. Dr. Soekirman - Deputi SDM, BAPPENAS).

**SESI 2 : MODERNISASI DAN PERUBAHAN KELUARGA**

Pimpinan Sidang : Dr. Syafrida Manuwoto

Sekretaris : Ir. Hartoyo, MSc.

10.40 - 11.00 *"Transisi Keluarga di Indonesia: Perspektif Global"* (Dr. Sri Harijati Hatmadji - Lembaga Demografi, FEUI).

11.00 - 11.20 *"Keluarga dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam Rangka Menyongsong Abad ke 21"* (Dr. Ir. Ratna Megawangi - GMSK FAPERTA IPB).

11.20 - 11.40 *"Peranan Keluarga dalam Proses Modernisasi dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya"*  
(Prof. Dr. Saparinah Sadli - Fakultas Psikologi UI)

11.40 - 13.00 Diskusi

13.00 - 14.00 Istirahat, makan siang

**SESI 3 : KETAHANAN DAN PERANAN KELUARGA DALAM ERA GLOBALISASI**

Pimpinan Sidang : Dr. Ir. Ujang Sumarwan

Sekretaris : Ir. Diah K. Pranaji, MS

14.00 - 14.20 *"Peran Agama dalam Era Globalisasi dan Modernisasi serta Kaitannya dengan Ketahanan dan Peranan Keluarga: Sudut Pandang Agama Islam"* (Ir. Haidar Bagir, MA - Harian REPUBLIKA).

14.20 - 14.40 *"Peran Agama dalam Era Globalisasi dan Modernisasi serta Kaitannya dengan Ketahanan dan Peranan Keluarga: Sudut Pandang Agama Kristen"* (Dr. Alex Paast-STF Driyarkara).

14.40 - 15.00 *"Penerapan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dalam Era Globalisasi"*  
(Dr. Kartono Mohammad - PKBI).

15.00 - 15.20 Rehat Kopi

15.20 - 16.40 Diskusi

22 September 1993

- 09.00 - 09.30 Pidato Pengarahan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita  
*"Kebijakan Pengembangan Peranan Wanita dan Kaitannya dengan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia"* disampaikan oleh Asisten Menteri UPW, (Ir. Supardan).
- 09.30 - 09.45 Rehat Kopi

**SESI 4 : UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Pimpinan Sidang : Dr. Ir. Syafri Mangkuprawira  
 Sekertaris : Ir. Cesilia Meti D.

- 09.45 - 10.05 *"Beberapa Aspek Dalam Kesejahteraan Keluarga"* (Dr. Ir. Hidayat Syarif, MS. Karo Pendidikan, Agama, Pemuda dan Olah raga, BAPPENAS).
- 10.05 - 10.25 *"Program UPGK dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Masyarakat Indonesia"* (Drs. Benny Kodyat, MPA - Direktorat Gizi Depkes).  
 Disampaikan oleh Sunarno, SKM., MPH.
- 10.25 - 10.45 *"Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan"* (Ir. Sarwititi S. Agung, MS. Tim PSW-LP IPB).
- 10.45 - 12.00 Diskusi
- 12.00 - 13.00 Istirahat, makan siang

**SESI 5 : PERAN GENDER DAN KEHIDUPAN KELUARGA**

Pimpinan Sidang : Ir. M. Khumaidi, M.Sc.  
 Sekertaris : Ir. Drajat Martianto

- 13.00 - 13.20 *"Perkembangan Keluarga dalam Pembangunan Berkelanjutan : Suatu Analisis Tenaga Kerja Wanita dan Permasalahannya Dalam Masyarakat Indonesia"* (Prof.Dr.Pudjiwati Sajogyo - PSW, LP IPB).
- 13.20 - 13.40 *"Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"* (Dra. Sjamsiah Achmad, MA - Asisten Menteri Bidang Pendidikan Wanita, Kantor Menteri Negara UPW).
- 13.40 - 14.00 *"Interaksi antara Keluarga dan Rumah tangga"* (Prof.Dr.Selo Sumarjan - UI).
- 14.00 - 15.00 Diskusi
- 15.00 - 15.20 Rehat Kopi
- 15.20 - 16.00 Perumusan hasil seminar dan Penutupan oleh Dekan Faperta IPB

## **RUMUSAN HASIL SEMINAR**

**Keluarga Menyongsong Abad 21  
dan Peranannya Dalam Pengembangan  
Sumberdaya Manusia Indonesia**

*Bogor, 21-22 September 1993*

## RUMUSAN HASIL SEMINAR

Lembaga keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang harus dibina menjadi unit yang kokoh dan kuat. Keluarga harus mampu meningkatkan kepedulian dan peran sertanya dalam pembangunan. Apabila keluarga sebagai wahana yang utama dalam pembangunan anggota dan lingkungannya sendiri dapat dibina dengan sebaik-baiknya, maka pembangunan sumberdaya manusia akan mudah terlaksana. Masyarakat Indonesia sedang mengalami transformasi sosial budaya yang cepat dan keluarga pun mengalami hal serupa. Kita perlu memberikan perhatian dan sumbangan pemikiran kepada keluarga agar keluarga tidak mengalami kejutan sosial yang dahsyat akibat kesenjangan kebudayaan.

Beberapa Langkah Pembangunan Kependudukan adalah:

- Pengendalian pertumbuhan penduduk
- Penurunan tingkat kematian
- Pengarahan mobilitas penduduk
- Peningkatan kualitas penduduk
- Memberikan kesempatan yang lebih luas pada usia lanjut
- Peningkatan upaya penerangan, pendidikan, dan penyuluhan mengenai kependudukan.
- Penyempurnaan administrasi, pencatatan, dan statistik kependudukan.

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap pertama telah mengakibatkan beberapa perubahan karakteristik demografis penduduk, di antaranya:

- Penduduk usia muda semakin berkurang proporsinya
- Penduduk semakin lebih berpendidikan
- Proporsi penduduk yang hidup di perkotaan semakin meningkat
- Meningkatnya angka harapan hidup
- Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita semakin meningkat
- Mobilitas penduduk semakin meningkat
- Angka perceraian yang diduga meningkat

Perubahan tersebut akan mempunyai implikasi terhadap struktur, jumlah, dan peran/fungsi keluarga. Perubahan tersebut adalah:

- Struktur keluarga semakin kecil
- Semakin banyak keluarga yang dikepalai oleh orang yang berumur lebih tua



- Jumlah rumahtangga dan keluarga yang semakin meningkat
- Pergeseran bentuk keluarga dan keluarga luas (*extended family*) menjadi keluarga inti.

Keluarga kecil ini diharapkan mempunyai implikasi sebagai berikut:

- Peningkatan kesehatan ibu dan anak
- Beban ekonomi keluarga semakin berkurang karena tanggungan keluarga makin sedikit.
- Kualitas anak akan semakin meningkat
- Mobilitas keluarga semakin tinggi
- Perubahan peran ayah dan ibu
- Perubahan nilai anak

Selain perubahan karakteristik demografis, keluarga juga mengalami perubahan sosial dan psikologis terhadap lembaga dan fungsi keluarga, yang meliputi:

- Perubahan nilai dan perilaku budaya
- Rasionalisasi ikatan perkawinan
- Perubahan posisi dan peran anggota keluarga
- Penurunan frekuensi dan kualitas komunikasi
- Penurunan kuantitas dan kualitas waktu kebersamaan dalam keluarga
- Menurunnya otorita orang tua, yaitu kemampuan orang tua dalam menanamkan nilai pada anak.
- Keluarga menerima arus informasi dari lingkungannya dengan cepat.

Perubahan-perubahan yang dialami keluarga bisa merupakan kendala yang dihadapi keluarga dalam menjalankan fungsinya. Karena itu agar keluarga mempunyai ketahanan dalam menghadapi perubahan, maka keluarga harus mampu berfungsi menjadi pusat penerusan nilai-nilai dari generasi tua ke generasi baru.

Lima fungsi sosial keluarga adalah:

1. Fungsi procreation - mengadakan keturunan
2. Fungsi sebagai kesatuan sosial
3. Fungsi pemersatu dan pelindung bagi anggotanya
4. Fungsi sosialisasi anak-anak melalui pendidikan
5. Fungsi sebagai unit produksi di dalam masyarakat

Dalam masyarakat modern fungsi keluarga tersebut mengalami proses pelemahan, karena tiap fungsi tersebut sebagian demi sebagian diambil alih oleh pranata-pranata sosial yang bertambah banyak dan bertambah besar pengaruhnya pada kehidupan keluarga.

Selain mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai lama, maka keluarga juga harus memperkenalkan dan mengarahkan nilai-nilai baru yang baik serta yang diinginkan bersama. Untuk menghadapi era globalisasi, maka keluarga juga harus mampu mempersiapkan anggota-anggotanya sehingga memiliki ciri-ciri yang cocok dengan tuntutan modernisasi. Ciri-ciri tersebut meliputi:

1. Kemampuan mengerjakan "high-tech"
2. Berpikir kreatif
3. Dapat menjalin kerjasama
4. Bersikap sensitif terhadap lingkungan
5. Bersikap spiritual dan toleran terhadap pluralisme

Keluarga juga harus memiliki kemampuan menyeleksi arus informasi yang bermanfaat bagi keluarga. Agar keluarga bisa melaksanakan fungsinya sehingga mencapai keluarga sejahtera sebagaimana tercantum dalam GBHN, maka perlu dukungan kebijakan pemerintah. Berikut ini adalah beberapa saran perlunya kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang:

1. Agar program pemerintah dapat terlaksana serta mengenai sarannya, maka perlu pengertian keluarga sejahtera didefinisikan dan dijabarkan secara jelas sehingga bisa diterima oleh seluruh strata masyarakat.
2. Perlu kebijakan pengaturan agar media massa seperti TV mencantumkan penjelasan tentang kesesuaian suatu acara yang ditayangkan bagi anggota-anggota keluarga tertentu, sehingga keluarga bisa menyeleksi acara yang cocok bagi keluarganya.
3. Perlu kebijakan sistim ketenagakerjaan yang memperhatikan keutuhan kehidupan keluarga terutama bagi suami/isteri yang keduanya berkarir.
4. Perlunya kebijakan yang mendukung proses pembentukan hubungan yang erat antara ibu dan anak adalah sangat mendesak untuk merumuskan cara mengoptimalkan peran keluarga dalam pendidikan anak dan remaja, sehingga fisik, mental dan sosial anak-anak dapat tumbuh kembang dengan baik.
5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan makna perkawinan melalui pemahaman ajaran agama sebagai salah satu langkah menuju keluarga bahagia.

6. Program-program dalam peningkatan kesejahteraan keluarga harus dilakukan secara holistik yang melibatkan semua sektor.

Proses pelembagaan NKKBS melalui program UPPKA menunjukkan hasil yang positif. UPPKA juga berhasil meningkatkan akses wanita terhadap usaha produktif, kredit dan pasar. Jangkauan program ini cukup luas dan jenis kegiatannya bersifat menghasilkan pendapatan, oleh karena itu program UPPKA mempunyai prospek yang baik sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Untuk kepentingan kalangan bawah maka perlu dikembangkan jenis usaha yang bercirikan segera menghasilkan pendapatan.

Gizi merupakan salah satu unsur penting bagi pembentukan manusia yang berkualitas. Oleh karena itu upaya pembangunan kualitas sumberdaya manusia memerlukan dukungan usaha perbaikan gizi. Mengingat keluarga merupakan organisasi terkecil dari satuan masyarakat dan keadaan gizinya akan menentukan keadaan gizi masyarakat secara keseluruhan maka salah satu pendekatan yang tepat dalam usaha perbaikan gizi adalah melalui keluarga sebagai sasaran utama pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga, dan pembentukan koperasi serba usaha. Kegiatan UPPKA sebaiknya juga meliputi kegiatan kepemimpinan serta berbagai kegiatan untuk mendinamisir kelompok.

Wanita sebagai ibu dan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, maupun sebagai sumberdaya manusia merupakan aset yang besar bagi pembangunan bangsa, oleh karenanya harus dapat ditingkatkan kedudukan dan perannya, sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa. Beberapa program yang akan dilakukan pada REPELITA VI:

- Meningkatkan derajat kesehatan wanita
- Meningkatkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- Meningkatkan kesejahteraan ibu
- Meningkatkan pendidikan dan penguasaan IPTEK di kalangan wanita
- Mencegah perkawinan usia muda
- Meningkatkan partisipasi KB
- Meningkatkan pengetahuan wanita dan pria sebagai orang tua
- Meningkatkan produktivitas kerja
- Pengembangan fasilitas sosial
- Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan wanita
- Meningkatkan keikutsertaan wanita dalam pembangunan
- Pengembangan iklim sosial budaya yang dapat mendukung peranan wanita dalam pembangunan bangsa.

Konsep peran jender berkembang seiring dengan proses perubahan yang terjadi di masyarakat. Meski mendapat peran yang semakin seimbang, namun tetap menjadi "ketidakseimbangan", peningkatan peran wanita disisi lain justru memperbesar tanggung jawab yang harus dipikul, karena wanita tidak hanya berperan ke dalam (sesuai kodratnya), tetapi juga keluar. Wanita lebih cepat dapat berperan di luar keluarga, sedangkan pria lebih lambat dapat berperan di dalam keluarga. Namun demikian peran jender ini bervariasi menurut keadaan sosial dan ekonomi keluarga serta adat istiadat setempat.

Perlu dikembangkan pola perilaku berwawasan jender, dimana hubungan suami isteri seharusnya merupakan *mitra sejajar* yaitu mempunyai pesan yang serasi, selaras, dan seimbang. Hal ini dapat berarti bahwa di satu sisi mengakui persamaan hak dan peran yang dapat dilakukan antara pria dan wanita, di sisi lain juga menghargai bahwa aspirasi dan peranan yang dapat diberikan oleh pria dan wanita tidak selalu sama, pola berpikir ini merupakan modal terciptanya ketahanan keluarga yang dicirikan oleh tingginya hubungan antara suami dan isteri.

## LAPORAN KETUA PANITIA

- Yth. Bapak Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN  
Yth. Para Asisten Menteri dan Staf Menteri dalam Lingkup Kantor Menteri  
Negara Kependudukan dan Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.  
Yth. Deputi bidang di lingkungan BKKBN dan BAPPENAS.  
Yth. Bapak Rektor IPB, para Dekan, Ketua Lembaga, dan para Ketua Jurusan di  
Lingkungan IPB.  
Yth. Bapak-bapak ibu-ibu undangan dan peserta seminar yang kami muliakan.

Selamat Pagi,  
*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan rasa syukur dan teriring puji kepada Yang Maha Esa, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan dan peserta yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada acara seminar *Mengisi Hari Keluarga Nasional 1993 dan Menyongsong Tahun Keluarga Internasional 1994* dengan tema "*Keluarga Menyongsong Abad 21 dan Peranannya dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia*". Seminar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Dies Natalis XXX IPB.

Tema seminar kita hari ini sejalan dengan arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini harus dimulai secara dini, dan pemerintah telah memutuskan bahwa keluarga adalah wahana pembangunan bangsa. Sebagai langkah awal pada tanggal 29 Juni 1993 Bapak Presiden Soeharto telah menetapkan "Hari Keluarga Nasional" yang setiap tahun jatuh pada tanggal 29 Juni. Selain itu perhatian terhadap keluarga di dunia internasional juga semakin besar, yang dicerminkan oleh dicanangkannya "Tahun Keluarga Internasional" pada tahun 1994 oleh badan PBB melalui resolusi nomor 44/82.

Bersamaan dengan lajunya pembangunan, keluarga Indonesia sedang mengalami transformasi sosial budaya. Transformasi ini dapat mempengaruhi kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsinya sebagai wahana pembangunan bangsa. Oleh karena itu, perlu dipikirkan agar pengaruh pembangunan yang cepat ini tidak membawa dampak negatif terhadap kehidupan keluarga, tetapi justru dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mengundang Bapak, Ibu dan Saudara dari berbagai sektor, lembaga dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berkecimpung dalam bidang yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk menghadiri seminar ini. Dengan harapan kita dapat bertukar pengalaman dan menghimpun pemikiran tentang berbagai masalah dan

upaya pengembangan dan peningkatan peranan keluarga dalam menyongsong abad 21, selanjutnya menggali berbagai gagasan tentang strategi dan model pengembangan yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan REPELITA pada PJP II ini.

Saudara-saudara peserta seminar yang saya hormati,

Kami sengaja mengundang peserta seminar dari berbagai sektor, karena kami menyadari bahwa keluarga adalah suatu institusi tempat terhimpunnya segala aspek kehidupan yang saling berinteraksi; agama, psikologi, sosiologi, antropologi, kesehatan dan gizi, pendidikan, kependudukan, dan lain-lain. Sehubungan dengan itu pada seminar ini kami telah mengundang 218 peserta dari unsur perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai kota, beberapa instansi pemerintah seperti BKKBN, Kantor Menko Kesra, Kantor Menteri UPW, BAPPENAS, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian dan Lembaga Penelitian, serta beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti WHO, CSIS, Lembaga Studi Asia, dan lain-lain.

Peserta Seminar yang berbahagia,

Pada kesempatan ini patut kami informasikan bahwa terselenggaranya seminar ini karena adanya dukungan penuh dari BKKBN, BAPPENAS dan batuan rekan-rekan panitia dan berbagai pihak yang cukup panjang bila disebutkan satu persatu. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah terlibat sehingga seminar ini bisa terlaksana.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti seminar. Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia,

Dr. Ir. Ratna Megawangi, M.Sc.

**SAMBUTAN REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Prof.Dr.Ir. Sitanala Arsyad**

**Pada Pembukaan Seminar  
Mengisi Hari Keluarga Nasional 1993  
dan Menyongsong Tahun Keluarga Internasional 1994**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

- Yth. Bapak Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN atau yang mewakilinya.
- Yth. Para Staf Ahli Menteri dan Asisten Menteri dalam Lingkup Kantor Menteri Negara Kependudukan.
- Yth. Para Deputi Bidang di Lingkungan BKKBN
- Yth. Para Dekan, Ketua Lembaga dan Ketua Jurusan di Lingkungan IPB
- Yth. Para Undangan dan Peserta Seminar

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-NYA kita bisa berkumpul di kampus IPB Darmaga dalam rangka Seminar Mengisi Hari Keluarga Nasional 1993 dan Menyongsong Tahun Keluarga Internasional 1994 dengan thema '*Keluarga Menyongsong Abad ke-21 dan Peranannya dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia*'. Kepada hadirin yang datang dari luar Bogor, kami mengucapkan selamat datang di kampus IPB yang sedang dalam suasana merayakan Dies Natalisnya yang ke-30.

Hadirin Yth.

Dalam era Pembangunan Jangka Panjang ke-2, masyarakat Indonesia akan dihadapkan kepada banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam PJP Pertama dan kemajuan yang pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan nasional makin terkait dengan perkembangan internasional. Perubahan-perubahan ini tentunya akan mengandung peluang dan kendala, sehingga keberhasilan kita memanfaatkan peluang dan sekaligus mengatasi kendala yang timbul sebagai akibat dari perubahan tersebut.

Perubahan-perubahan itu mempunyai dampak terhadap kehidupan keluarga sebagai unit organisasi terkecil dalam tatanan masyarakat. Sebagai contoh: keberhasilan pembangunan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tentunya berdampak terhadap keluarga. Banyak keluarga dari generasi yang lebih muda ternyata hidup dengan jumlah anak yang lebih kecil. Kondisi ini memperbesar peluang keluarga untuk dapat memperhatikan kualitas hidup anak-anaknya.

Hadirin Yth.

Sebagai dampak dari era globalisasi, setiap keluarga dihadapkan pada masalah perubahan sistem nilai yang dianutnya. Setiap saat, melalui televisi kita diperkenalkan dengan sistem nilai yang berasal dari luar yang tidak jarang sistem nilai itu tidaklah sesuai dengan sistem nilai dan kondisi masyarakat kita. Secara disadari atau tidak, sistem nilai dari luar begitu mudahnya memasuki rumah dan kehidupan kita. Sering sistem nilai "baru" yang berasal dari luar lebih cepat diadopsi oleh anggota keluarga yang muda daripada anggota keluarga yang lebih tua, sehingga timbul konflik antara anak-anak dan orangtuanya.

Mungkin di antara kita masih ingat bahwa dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat setahun yang lalu, salah satu isu muncul -- pada waktu itu -- adalah mengenai keluarga, baik yang mempertanyakan keberadaan dan fungsi keluarga maupun sistem nilai keluarga. Munculnya isu itu didasarkan pada fenomena-fenomena seperti meningkatnya angka perceraian, semakin banyaknya kasus kelahiran di luar pernikahan, dan fenomena lainnya. Fenomena tersebut didasari oleh sistem nilai yang pada hakekatnya sedang memasuki kehidupan masyarakat kita. Kita harus berupaya untuk waspada dan menyaring terhadap sistem nilai dari luar, karena kita tentunya tidak ingin apa yang telah dialami oleh masyarakat di Amerika Serikat tersebut terjadi pada masyarakat kita.

Hadirin Yth.

Pembangunan sosial ekonomi yang begitu cepat di Indonesia juga telah membawa banyak perubahan dalam keluarga, di antaranya perubahan struktur dan fungsi keluarga, sistem nilai, dan peranan anggota keluarga. Sebagai contoh: struktur keluarga cenderung merupakan keluarga inti (nuclear family). Ibu rumah-tangga harus berperan ganda, sebagai pencari nafkah dan pekerja dalam rumah-tangganya. Ibu rumah-tangga harus mengasuh anaknya sendiri, karena suami harus berurbanisasi ke luar kota. Perubahan-perubahan dalam keluarga ini tentunya dapat dilihat sebagai potensi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan sekaligus sebagai aspek yang akan berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga.



Masyarakat Indonesia pada hakekatnya sedang mengalami transformasi sosial yang sangat tajam dan cepat. Kita harus bisa memikirkan agar keluarga-keluarga yang ada di dalamnya tidak mengalami kejutan sosial yang amat hebat. Keluarga Indonesia yang pada umumnya merupakan keluarga tradisional yang bergantung pada sektor pertanian, dalam waktu yang singkat harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan internasional.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 disebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan sekaligus membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga harus berperan sebagai wahana pembangunan bangsa yang diharapkan dapat berfungsi dalam pembangunan sumberdaya manusia secara menyeluruh.

Hadirin Yth.

Apa yang sudah saya kemukakan merupakan sebagian kecil dari masalah-masalah yang dihadapi keluarga di Indonesia. Institut Pertanian Bogor khususnya melalui Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, juga mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap masalah yang dihadapi keluarga, mengingat masih cukup besarnya keluarga yang tergantung pada sektor pertanian. Dalam konteks Sistem Pertanian Berkelanjutan, -- yang menjadi pola ilmiah pokok IPB --, kualitas hidup petani dan keluarganya merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

Melalui seminar ini dalam rangka Mengisi Hari Keluarga Nasional 1993 dan Menyongsong Tahun Keluarga Internasional 1994 diharapkan dapat terkumpul pemikiran-pemikiran terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga dalam menyongsong abad ke-21 yang dikenal sebagai era globalisasi. Pemikiran-pemikiran ini diharapkan dapat dijadikan input untuk penyusunan kebijakan keluarga sejahtera dan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia dalam REPELITA VI dan PJP II.

Dengan mengucapkan "*bismillahirrochmaanirrochiim*" maka dengan ini Seminar Mengisi Hari Keluarga Nasional 1993 dan Menyongsong Tahun Keluarga Internasional 1994 dengan thema : "*Keluarga Menyongsong Abad ke-21 dan Peranannya dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia*" yang akan berlangsung selama 2 hari yang dimulai hari ini, dibuka.

Selamat berseminar.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

**ARAH KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN  
DALAM UPAYA PENINGKATAN  
KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

*(Pidato Pengarahan Menteri Negara Kependudukan/  
Kepala BKKBN)*

**Disampaikan pada seminar:  
Keluarga Menyongsong Abad XXI dan Peranannya  
Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia  
21-22 September 1993, Kampus IPB Darmaga Bogor**



MENTERI NEGARA  
KEPENDUDUKAN/KEPALA BKKBN  
REPUBLIK INDONESIA

xvi

## KELUARGA SEJAHTERA

Oleh  
Dr. Haryono Suyono

*Assalamualaikum wr.wb.*

Bapak Rektor IPB yang kami hormati.

Bapak/Ibu para undangan dan peserta seminar yang kami hormati.

Panitia penyelenggara seminar yang kami muliakan.

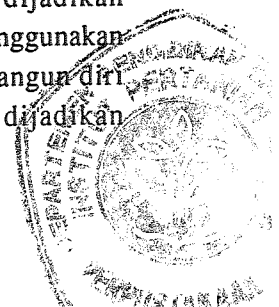
Pertama kali kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat menghadiri acara seminar yang amat penting ini dalam keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih atas prakarsa yang dilakukan oleh Pimpinan IPB pada umumnya dan GSMK pada khususnya untuk menyelenggarakan acara seminar ini. Pelaksanaan seminar ini kami anggap sangat tepat oleh karena saat ini kita segera memulai suatu tahapan baru dari awal Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II dimana masalah Kependudukan dan Keluarga Sejahtera memperoleh perhatian yang makin tinggi dalam pembangunan nasional di negara kita dan untuk pengembangannya masih diperlukan masukan dari berbagai pihak.

*Saudara-saudara para peserta seminar sekalian.*

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam PJPT I segera akan berakhir dan hasil-hasil yang diperoleh cukup meyakinkan. Dari segi kependudukan dampak dari keberhasilan program tampak dari ukuran keluarga Indonesia yang makin kecil, tingkat pendidikan anggota keluarga yang makin bertambah baik, rata-rata usia perkawinan yang meningkat, partisipasi angkatan kerja wanita yang makin tinggi, tingkat kesehatan yang makin meningkat yang ditandai adanya tingkat kelahiran dan tingkat kematian balita yang menurun serta usia harapan hidup yang makin meningkat.

Keberhasilan yang cukup mengembirakan tersebut harus dijadikan motifasi yang kuat untuk membangun kualitas penduduk dengan menggunakan lembaga keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam membangun diri dan anggotanya secara mandiri. Keluarga-keluarga harus dapat dijadikan



wahana pembangunan bangsa.

Sebagai unit kecil dalam masyarakat keluarga harus dapat dibina menjadi unit yang kokoh, kuat dan mempunyai kemampuan yang unggul dalam mengentaskan permasalahan yang dialami. Keluarga sebagai kelompok individu harus mampu meningkatkan kepedulian dan peran sertanya dalam pembangunan. Keluarga tidak saja menjadi arahan tetapi juga kekuatan pembangunan yang handal.

Apabila keluarga sebagai wahan yang pertama dan utama dalam pembangunan anggota dan lingkungannya sendiri dapat dibina dengan sebaik-baiknya, maka hampir pasti usaha kita untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, dinamis, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan lebih mudah untuk diwujudkan. Sebagai hasil akhir yang dapat diperoleh adalah dapat terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagai hasil pembangunan nasional yang dilakukan.

#### MASALAH YANG MASIH DIRASAKAN.

*Para hadirin yang berbahagia.*

Hasil pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga sejahtera telah menghasilkan perubahan terhadap ciri kependudukan yang cukup berarti, namun demikian dalam repelita VI masih terdapat masalah kependudukan yang masih perlu ditanggulangi agar hasil pembangunan makin dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Masalah kependudukan sampai saat ini tidak didominasi oleh tiga permasalahan pokok yakni masih tingginya jumlah penduduk, angka pertumbuhan yang tinggi, dan penyebaran penduduk yang tidak merata, tetapi terdapat masalah lain yang makin meningkat intensitinya seperti makin besarnya pertumbuhan angka kerja, termasuk wanita dan makin meningkatnya proporsi umur tua. Masalah-masalah tersebut telah meningkatkan perhatian kita untuk lebih menggalakkan upaya pengembangan kualitas penduduk. Oleh karena itu perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kualitas penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia dan mengangkat harkat dan martabat manusia dalam segala matra kependudukannya.

Masalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya telah mengalami perbaikan, karena selama dekade 1980-1990 penduduk Indonesia bertambah rata-rata sekitar 1,97 persen per tahunnya. Ini menunjukkan penurunan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup bermakna dibandingkan dengan selama dekade 1971-1980 dimana rata-rata pertumbuhan penduduk

nya 2,32 persen per tahun. Angka pertumbuhan penduduk tersebut akan terus menurun sejalan dengan keberhasilan pembangunan selama jangka panjang pertama. Bahkan angka pertumbuhan ini diperkirakan mendekati satu persen pada akhir pembangunan jangka panjang kedua.

Penurunan tingkat pertumbuhan tersebut pada hakekatnya karena semakin menurunnya angka kelahiran, yang sebagian besar disebabkan sebagai dampak dari banyaknya pasangan usia subur yang memakai alat kontrasepsi. Rata-rata anak yang pernah dilahirkan terhadap wanita usia reproduksi mengalami penurunan yaitu dari 5,48 (tahun 1980) menjadi 3,02 pada tahun 1990. Rata-rata penurunan ini sekitar 8,39 persen per tahun. Hal ini juga relevan memperhatikan perbedaan penurunan antar desa-kota yaitu 9,91 persen untuk daerah perkotaan dan 7,88 persen untuk daerah pedesaan. Secara nasional tingkat fertilitas ini diharapkan mencapai "*replacement level*" pada tahun 2005-2010.

Dalam kurun waktu 25 tahun mendatang, angka kematian akan cenderung terus menurun, sehingga usia harapan hidup akan terus meningkat. Pada awal tahun 1993 ini, angka kematian kasar (CDR) diperkirakan akan mencapai sekitar 8,5 per seribu penduduk dari keadaannya sekitar 9,0 per seribu pada tahun 1985-1990, dan angka ini akan terus menurun hingga mencapai 7 per seribu penduduk pada akhir pembangunan jangka panjang kedua. Angka kematian bayi yang saat ini berada pada tingkat 65 per seribu kelahiran diperkirakan akan mengalami penurunan hingga kurang dari setengahnya, yaitu menjadi 28 untuk setiap seribu kelahiran pada tahun 2020.

Masyarakat Indonesia yang sedang mengalami transformasi sosial budaya yang cukup memerlukan perhatian dan sumbangan pemikiran kita agar keluarga yang ada di dalamnya tidak mengalami kejutan sosial yang dahsyat akibat kesenjangan kebudayaan. Keluarga Indonesia yang biasanya adalah keluarga tradisional pertanian dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari satu periode kehidupannya, harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan internal yang dahsyat. Mereka yang biasanya tidak harus mendidik melalui institusi asing seperti sekolah, sekarang hampir seluruhnya harus mengikuti proses sosialisasi melalui sekolah dan mengikuti proses itu dalam periode yang cukup lama. Proses pembentukan keluarga yang biasa diatur orang tua, sekarang ini sudah banyak diatur para generasi muda sendiri.

Jumlah anak yang banyak digantikan jumlah anak yang sedikit memberi kesempatan orang tua untuk mendidik anaknya nampaknya merupakan sesuatu perubahan yang menarik, tetapi sesungguhnya merupakan pula beban penyesuaian yang cukup berat. Dan masih banyak lagi perubahan struktural keluarga

yang berkembang dengan kecepatan yang tinggi, termasuk partisipasi wanita dalam angkatan kerja yang memberikan kesibukan tersendiri kepada keluarga untuk mencapai kemampuan mereka yang maksimal.

Para ahli sependapat bahwa Republik Indonesia yang bhineka tunggal ika itu mempunyai keluarga dengan berbagai sifat yang mejemuk. Keluarga Indonesia yang standar tidak ada, tetapi kita mempunyai berbagai jenis keluarga yang justru merupakan kekayaan budaya bangsa yang mejemuk dan saling bisa hidup bersama dalam keadaan saling isi mengisi. Kemajemukan ini memberikan pula keanekaragaman yang menarik untuk usaha pengembangannya. Kemajemukan ini pula yang memberikan sumbangan yang berguna untuk menyatukan bangsa ini karena sifat kekeluargaan dan toleransi antar suku bangsa yang beraneka ragam tersebut.

Dengan mengembangkan berbagai fungsi yang ada dalam keluarga, maka timbullah posisi baru dalam Gerakan Pembangunan Keluarga ini, yaitu bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menjadi jaringan lembaga pembangunan yang dinamis. Dalam jangka yang panjang institusi keluarga akan bisa kita kembangkan menjadi sumberdaya pembangunan yang handal dan bisa menjadi kekuatan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan dalam arti yang luas.

#### **ARAHAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**

*Para peserta seminar yang terhormat.*

Dalam rangka Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera untuk PJPT II kita sangat beruntung telah mempunyai pedoman dan arahan, yaitu Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera serta Garis-garis Besar Haluan Negara 1993.

Dalam rangka perkembangan kependudukan, Undang-undang tersebut tidak saja memberikan hak-hak penduduk baik sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat dan warga negara maupun sebagai himpunan kuantitas yang besar, akan tetapi Undang-undang juga mewajibkan setiap penduduk untuk mewujudkan dan memelihara keserasian, keselarasan, antara kuantitas, kualitas dan mobilitasnya dengan lingkungan hidup serta memperhatikan kemampuan ekonomi, nilai-nilai sosial budaya dan agama. Untuk itulah dalam undang-undang juga telah digariskan bahwa setiap penduduk berkewajiban mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan

dan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu setiap penduduk berkewajiban atas pencatatan setiap kelahiran kematian dan perpindahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

GBHN 1993 dalam pembangunan kependudukan menjelaskan bahwa *"Kebijaksanaan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan nasional agar memiliki semangat kerja, budi pekerti luhur, penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan"*. Lebih lanjut diarahkan dalam GBHN bahwa *"Pengelolaan kependudukan juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, ketrampilan, derajat kesehatan dan kesejahteraan, dan menciptakan lapangan kerja, serta memertakan pembangunan dan pendapatan. Pembangunan kualitas penduduk yang meliputi kualitas fisik dan nonfisik serta pelayanan terhadap penduduk terus ditingkatkan dengan memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara penduduk dengan daya dukung alam dapat dikembangkan secara optimal, khususnya masyarakat rentan. Kuantitas dan mobolitas penduduk terus dikendalikan dan diarahkan agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa secara efektif"*.

Selanjutnya GBHN juga telah memberikan petunjuk agar *"penerangan, pendidikan, dan penyuluhan mengenai kependudukan, termasuk keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perlu makin ditingkatkan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan lainnya"*.

Keluarga menurut Undang-undang tersebut merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Pembinaannya diarahkan ke terbentuknya Keluarga Sejahtera. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan meterial yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karena itu pembangunan keluarga sejahtera diarahkan secara bertahap dan dilakukan bersama dengan masyarakat. Salah satu arahan yang mutlak adalah dengan usaha *"Keluarga Berencana"* yang menurut undang-undang diartikan *"upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera"*.

Dalam hubungan ini GBHN 1993 juga telah memberikan petunjuk bahwa "pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Demikian juga perlu ditumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa".

Dengan berbagai pedoman yang demikian rinci, maka mulai tahun anggaran 1993-1994 ini pemerintah mengajak seluruh kekuatan pembangunan yang ada, baik instansi pemerintah maupun lembaga dan organisasi masyarakat untuk bahu membahu melaksanakan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera melalui upaya membangun ketahanan, kualitas, dan kemandirian keluarga agar mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan UU dan GBHN yang telah disepakati bersama.

#### **PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA SEBAGAI WAHANA PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA.**

*Para peserta seminar yang kami muliakan.*

Dalam PJPT II penduduk selain sebagai kekuatan pembangunan sekaligus sebagai arahan pembangunan. Dengan demikian semua kebijaksanaan harus berorientasi kepada keadaan penduduk yang akhirnya menghasilkan peningkatan kesejahteraan penduduk dan menciptakan proses pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam melihat keadaan penduduk tidak hanya dari segi jumlahnya saja, tetapi juga struktur, komposisi dan dinamika penduduk, potensi dan karakteristik lain yang dimiliki.

Kebijaksanaan kependudukan di Indonesia pada hakekatnya mencakup konteks yang sangat luas, menyangkut berbagai aktivitas yang saling terkait dan kompleks agar tercapai keserasian antara kemajuan materi di satu pihak dan kebahagiaan batin di lain pihak. Arah pembanguna jangka panjang tahap kedua di bidang perkembangan kependudukan ialah terkendalinya pertumbuhan penduduk yang rendah, sehingga pada tahap berikutnya tercapai penduduk tanpa pertumbuhan. Dengan demikian kualitas penduduk akan meningkat secara merata dan menjadi sumberdaya pembangunan yang tangguh dan efisien.

Untuk menuju arah tersebut kebijaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua digariskan sebagai berikut :



1. Pengendalian kuantitas penduduk yang didasarkan atas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya.
2. Pengembangan kualitas penduduk yang diarahkan pada terwujudnya kualitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia, pengguna dan pemelihara lingkungan, dan pembina keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
3. Pengarahan mobilitas penduduk dan penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini dilakukan melalui pengarahan urbanisasi, pengarahan migrasi dan pengarahannya keseimbangan penduduk.
4. Pengembangan informasi kependudukan, agar terjalin jaringan informasi yang lengkap dan akurat sehingga data dan informasi kependudukan dapat dipergunakan oleh berbagai sektor pembangunan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Berbagai upaya yang mendasari kebijaksanaan ini antara lain melalui upaya pengembangan data kependudukan, pengembangan administrasi kependudukan termasuk vital registrasi, dan perencanaan kependudukan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Secara rinci maka berbagai langkah pembangunan kependudukan dapat diformulasikan sebagai berikut :

- a. Pengendalian pertumbuhan penduduk terutama dilakukan untuk lebih menurunkan angka kelahiran melalui gerakan keluarga berencana mandiri yang makin meningkat.
- b. Penurunan tingkat kematian khususnya kematian anak di bawah usia lima tahun melalui program pelayanan kesehatan terpadu, serta meningkatkan kesejahteraan Ibu.
- c. Pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan harus sesuai dengan tata ruang.
- d. Peningkatan kualitas penduduk yang meliputi kualitas fisik dan nonfisik serta peningkatan pelayanan terhadap penduduk agar potensi penduduk dapat dikembangkan secara optimal, khususnya masyarakat rentan.
- e. Memberikan kesempatan kepada penduduk usia lanjut untuk berperan dalam pembangunan.
- f. Peningkatan upaya penerangan, pendidikan dan penyuluhan mengenai kependudukan, termasuk keluarga berencana dan keluarga sejahtera agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- g. Penyempurnaan administrasi, pencatatan dan statistik kependudukan.

Pembangunan kependudukan dalam kaitannya dengan "matra keluarga", maka perlu digarisbawahi bahwa pembangunan keluarga seyogyanya memang menjadi tanggung jawab dan kewajiban masing-masing keluarga untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi keberhasilannya. Usaha menghidupkan fungsi-fungsi keluarga yang di setiap bangsa atau suku bangsa berbeda satu sama lain seyogyanya memang menjadi wewenang dan tanggung jawab setiap keluarga itu pula. Namun demikian nampaknya disadari oleh para ahli bahwa tidak semua keluarga mempunyai kemampuan yang sama.

Membangun keluarga sejahtera pada hakekatnya mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Pengentasan keluarga dari kemiskinan melalui KB sebenarnya telah mulai sekitar tahun 1970 dengan mengembangkan kesadaran, sikap, dan tingkah laku positif dan memecahkan setiap hambatan yang ada. Karena saat ini tingkat kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi, tingkat pendidikan wanita rendah, dan kesempatan mereka ikut serta dalam pembangunan juga sangat rendah, maka program utama pembangunan keluarga sejahtera telah diarahkan untuk memperbaiki kondisi para ibu dan anak.

Setelah duapuluh tahun ternyata program ini telah dapat dijadikan suatu gerakan masyarakat yang makin mandiri. Masyarakat makin sadar dan mengetahui bahwa dengan mengikuti gerakan KB kemampuan keluarga makin bisa dikerahkan dan fungsi-fungsi suatu keluarga makin bisa diwujudkan dengan penuh tanggung jawab.

Adapun fungsi-fungsi utama keluarga yang akan dikembangkan dengan paket-paket kegiatan adalah sebagai berikut :

- fungsi keagamaan untuk mengembangkan keluarga dan anggotanya agar tetap dan makin bertambah iman dan taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- fungsi budaya untuk membina keluarga agar tetap menghormati dan mengembangkan budaya bangsa yang luhur dan berkelanjutan,
- fungsi kecintaan untuk mengembangkan keluarga sebagai wahana cinta kasih antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan sesamanya,
- fungsi melindungi untuk mengembangkan kepercayaan bahwa keluarga adalah wahana utama yang memberikan rasa aman dan nyaman,
- fungsi sosialisasi dan mendidik untuk sekaligus mempersiapkan generasi baru yang lebih baik,
- fungsi ekonomi untuk mengembangkan kemampuan ekonomi keluarga agar semua anggota mampu mengembangkan kemampuan ekonominya untuk mandiri,
- fungsi pelestarian lingkungan untuk menciptakan lingkungan hidup yang sejuk dan penuh dengan kenyamanan.

Dengan mengembangkan fungsi-fungsi keluarga dalam paket-paket pembangunan itu diharapkan dapat dilaksanakan Gerakan Pembangunan Keluarga, hingga dalam jangka panjang institusi keluarga akan bisa kita kembangkan menjadi sumber daya pembangunan yang handal.

Demikian secara garis besar pokok pembangunan keluarga sejahtera yang dalam Pelita VI dan PJPT II masih memerlukan perhatian kita semua sebagai wahana untuk ikut membangun sumber daya manusia. Secara khusus memang pembahasan lebih dititikberatkan pada pembangunan keluarga sejahtera, namun demikian upaya-upaya yang harus dilakukan merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan perlu dikoordinasikan antara Departemen, Instansi maupun Institusi Masyarakat dan Swasta yang selama ini telah ikut serta membangun keluarga Indonesia.

Pencanangan Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni 1993 sekaligus merupakan awal dari kepedulian kita secara nasional untuk menyongsong Hari Keluarga Internasional pada tanggal 15 Mei 1994.

Dengan berbagai komitmen politis tersebut diharapkan bahwa pada tahun-tahun yang akan datang pembangunan keluarga di Indonesia akan merupakan suatu gerakan masyarakat yang maha besar dan dinamis. Gerakan ini akan bisa mendukung 42 juta keluarga Indonesia dewasa ini serta jutaan keluarga Indonesia yang akan berkembang di masa-masa yang akan datang.

Mudah-mudahan *Allah S.W.T.* meridhoi usaha kita sekalian.  
*Amien.*

Jakarta, 21 September 1993.

Menteri Negara Kependudukan/  
Kepala BKKBN

Dr. HARYONO SUYONO.

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERANAN WANITA  
DAN KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN  
KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA**

*(Pidato Pengarahan Menteri Negara UPW)*

Disampaikan pada seminar:

**Keluarga Menyongsong Abad XXI dan Peranannya  
Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia  
21-22 September 1998, Kampus IPB Darmaga Bogor**



MENTERI NEGARA  
URUSAN PERANAN WANITA  
REPUBLIK INDONESIA

XXV

## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERANAN WANITA DAN KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA

Oleh :

Menteri Negara Urusan Peranan Wanita

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Pertama-tama kami menyampaikan penghargaan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ikut memberikan sumbang saran pada seminar yang telah diselenggarakan ini, dalam rangka mengisi Hari Keluarga Nasional 1993 dengan mengambil thema '*Keluarga Menyongsong Abad XXI dan Peranannya Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia*'.

Mengenai betapa besar dan pentingnya peranan keluarga dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia harus dapat dimulai sedini mungkin, bahkan sejak janin dalam kandungan. Dan proses pengembangan kualitas sumberdaya manusia sejak dini itu berlangsung dalam kehidupan keluarga.

Sehubungan dengan itu kehidupan yang sejahtera merupakan suatu kondisi yang sangat diperlukan bagi keberhasilan dalam pembangunan kualitas sumberdaya manusia sejak dini. Dalam hal ini wanita sebagai ibu, di samping yang mengandung dan melahirkan, juga merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.

Pendidikan menyangkut proses transmisi nilai-nilai, informasi, pengertian, pengetahuan dan ketrampilan melalui berbagai bentuk interaksi antara ibu dan anak.

Bentuk interaksi dalam proses mendidik yang antara lain melalui pelbagai cara yaitu melalui peranannya sebagai "suri tauladan", melalui fungsi sebagai pemuas kebutuhan anak, khususnya kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman dan lain sebagainya, melalui peran ibu sebagai pembentuk konsep diri, dan juga melalui peranannya sebagai stimulator tumbuh kembang anak.

Dengan demikian kita pahami bersama bahwa peranan wanita memiliki nilai yang strategis bagi pembangunan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka pembangunan bangsa.

Mengacu kepada GBHN 1993 pokok-pokok kebijakan nasional peningkatan peranan wanita dalam pembangunan bangsa pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan kedudukan, peranan, kemampuan, ketahanan mental dan spiritual serta kemandirian wanita sebagai bagian integral upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Kebijakan ini diarahkan agar wanita dalam semua kesempatan baik dalam kegiatan pembangunan maupun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berperan aktif secara maksimal sebagai mitra sejajar pria yang serasi dan selaras dilandasi hubungan dan sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling membantu. Peningkatan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan berarti juga peningkatan tanggung jawab dan peranannya sebagai pribadi yang mandiri dalam kebersamaan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Wanita sebagai ibu bersama-sama dengan pria sebagai bapak atau dengan kata lain sebagai orang tua bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pendidikan anak dan remaja dengan selalu bertumpu pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Memperhatikan apa yang telah kami uraikan di atas, kehidupan kemitrasejajaran pria dan wanita yang serasi dan selaras serta seimbang sesungguhnya bukanlah merupakan tujuan akhir peningkatan peranan wanita, tetapi merupakan suatu situasi dan kondisi yang merupakan kebutuhan dan perlu untuk dapat diwujudkan bersama guna memungkinkan wanita bersama-sama pria dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat wanita.

Kemitrasejajaran pria dan wanita yang serasi, selaras dan seimbang hanya akan dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya apabila dapat dikurangi sejauh mungkin kesenjangan perwujudan nyata dalam kehidupan mengenai kesamaan hak, kewajiban, kesempatan, peranan dan tanggung jawab pria dan wanita baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta dalam kegiatan pembangunan di segala bidang.

Sehubungan dengan itu, kepedulian kesediaan dan kemampuan yang lebih besar dari kita semua, pria dan wanita, dalam mengintegrasikan aspirasi, kepentingan dan peranan wanita dalam rangka meningkatkan keikutsertaan wanita di samping pria dalam arus utama pembangunan bangsa, termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia perlu untuk dikembangkan dengan sebaik-baiknya dalam masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Peluang dan kesempatan maupun kemampuan wanita sebagai pengambil keputusan, penentu kebijakan, perencana dan pelaksana serta pemanfaat dan penikmat hasil pemban-

gunakan harus dapat makin ditingkatkan dan dikembangkan di masa depan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia meliputi baik aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dapat diupayakan sejak dini dalam kehidupan seseorang, dan merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak serta memiliki sikap kemandirian yang andal.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang harus dapat dimulai sejak dini dalam lingkungan kehidupan keluarga sangat erat berkaitan dengan kualitas kedudukan, peranan, kemampuan, ketahanan mental dan spiritual serta kemandirian wanita baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Perwujudan transformasi struktural dari masyarakat tradisional agraris ke masyarakat industri akan makin terwujud di Indonesia dalam masa PJPT II. Lahirnya masyarakat industri, yang akan makin berkembang, terutama di kota-kota besar, selain akan membawa berbagai peluang dan kesempatan untuk kemajuan juga dapat menimbulkan berbagai dampak baik yang positif maupun negatif, yang disebabkan oleh perubahan nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat "baru", masyarakat industri. Budaya konsumtivisme dapat diperkirakan akan makin berkembang dengan segala akibatnya. Di samping itu proses globalisasi yang menyentuh semua aspek kehidupan akan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Kesemuanya itu selain menumbuhkan berbagai kesempatan dan peluang untuk kemajuan kehidupan juga dapat menimbulkan pula berbagai tantangan dan gangguan yang apabila tidak kita waspadai akan dapat menggoyahkan sendi-sendi kepribadian bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Persaingan antar bangsa yang makin kuat menuntut kemampuan kemandirian bangsa yang lebih besar dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan makin berkembang di masa depan selain akan dapat membawa kemajuan dalam peradaban dan kehidupan bangsa, akan dapat pula memberikan dampak yang dapat merugikan kehidupan dan peradaban bangsa apabila tidak dapat diwaspadai secara dini. Oleh karena itu kita harus dapat senantiasa mencegah dan menangkal dengan sebaik-baiknya dampak negatif yang timbul dari berbagai perubahan tersebut. Wanita sebagai ibu dan pendidik pertama dan utama anak-anaknya, maupun sebagai sumber daya manusia merupakan aset yang besar bagi pembangunan bangsa, dan karenanya harus dapat ditingkatkan kedudukan dan peranannya, sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu berbagai kebijakan dalam peningkatan peranan wanita pada REPELITA VI menyongsong abad ke XXI, berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, akan meliputi berbagai hal, antara lain : (1) meningkatkan derajat kesehatan wanita, yang harus dapat dimulai sejak Balita. Bertolak dari derajat kesehatan dan status gizi Balita wanita yang baik akan dapat diwujudkan kesehatan ibu yang baik yang dapat melahirkan bayi yang sehat; (2) meningkatkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; (3) meningkatkan kesejahteraan ibu, sehingga dapat menurunkan secara cepat kematian ibu maternal; (4) meningkatkan pendidikan dan penguasaan IPTEK di kalangan wanita; (5) mencegah sejauh mungkin perkawinan usia muda di kalangan wanita; (6) meningkatkan penghayatan keluarga berencana dan kehidupan reproduksi sehat; (7) pengembangan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai ajaran agama dan dalam menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan dalam kehidupan; (8) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan wanita dan pria sebagai orang tua dalam bertanggung jawab dan berperan aktif mengasuh dan mendidik anak dan remaja, bertumpu pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa; (9) meningkatkan produktivitas kerja, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja wanita; (10) pengembangan fasilitas sosial yang dapat makin mendukung pelaksanaan peran ganda wanita secara serasi dan selaras; (11) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan wanita; (12) meningkatkan keikutsertaan wanita secara aktif dalam pembangunan ekonomi; (13) pengembangan iklim sosial budaya yang dapat makin mendukung peranan wanita dalam pembangunan bangsa.

Demikianlah antara lain pokok-pokok kebijakan yang akan dikembangkan oleh pemerintah dengan partisipasi penuh segenap potensi masyarakat dalam meningkatkan peranan wanita dalam masa REPELITA VI berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Semoga arahan ini akan dapat menambah masukan yang bermanfaat bagi seminar, dan atas perhatian hadirin sekalian terima kasih kami sampaikan.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Bogor, 22 September 1993  
Menteri Negara  
Urusan Peranan Wanita

Ny. Hj. Mien Sugandi



**PERAN AGAMA DALAM ERA GLOBALISASI  
DAN MODERNISASI SERTA KAITANNYA  
DENGAN KETAHANAN DAN PERANAN  
KELUARGA : *SUDUT PANDANG AGAMA ISLAM***

*Oleh :*  
*Ir. Haldar Bagir, MA.*  
*(Harian REPUBLIKA)*  
(Tanpa Makalah)

Disampaikan pada seminar:  
"Keluarga Menyongsong Abad XXI dan Peranannya  
Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia  
21-22 September 1993, Kampus IPB Darmaga Bogor

**DISKUSI  
SESI II - VI**

## DISKUSI SESI II

### Pertanyaan

#### 1. Staf Fisipol UGM :

Dari apa yang diuraikan terkesan bahwa bila "keluarga kecil dapat terbentuk, kesejahteraan akan tercapai". Kenyataannya banyak kendala, terutama bila ibu bekerja, yaitu: intensitas internal berkurang; fungsi sosialisasi norma dan nilai budaya berkurang; dan ada kecenderungan untuk memiliki lebih (materi) yang kesemuanya dapat menyebabkan keseimbangan dalam keluarga timpang. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah pentingnya keseimbangan dalam keluarga dan perlu revisi atau peninjauan kembali peran masing-masing anggota keluarga.

Dalam menghadapi transisi keluarga dari fase tradisional ke fase modern, perlu pendekatan dari keluarga dan '*public policy*'. Hendaknya lebih ditekankan pada satu pendekatan, supaya tidak terjadi saling mengandalkan.

### Jawaban

#### Dr. Sri Harjati Hatmadji :

Kami setuju bahwa keseimbangan dalam keluarga adalah sangat penting. Perubahan struktur keluarga dari besar menjadi kecil memang tidak selalu menjamin bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga akan tercapai. Proses modernisasi yang mempunyai andil dalam perubahan struktur keluarga ini mempunyai andil pula dalam mengubah beberapa fungsi keluarga. Fungsi sosialisasi dan pengasuhan anak yang pada keluarga tradisional merupakan tugas ibu sepenuhnya, telah berubah dengan banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah. Oleh karena itu memang perlu suatu keseimbangan di dalam keluarga terutama pada pembagian tugas dan peran di dalam keluarga.

#### Dr.Ir. Ratna Megawangi, M.Sc. :

Menciptakan suatu keseimbangan dalam keluarga hendaknya jangan sepenuhnya diserahkan kepada institusi keluarga saja. Dengan melihat kondisi yang ada sekarang ini, rasanya tidak mungkin kita mengharap keluarga kembali kepada jaman yang lalu. Keluarga membutuhkan bantuan adalah suatu kenyataan. Oleh karena itu kita memerlukan suatu alternatif lain untuk membantu keluarga, yaitu dengan '*public policy*'. Tentunya suatu

'*public policy*' yang dapat mendorong keluarga bisa menjadi lebih mandiri. Memang kelemahan '*public policy*' adalah mungkin akan membuat keluarga menjadi lebih tidak mandiri, oleh karena itu perlu sebuah pendekatan yang justru dapat menguatkan ketahanan keluarga.

Juga pemerintah dapat berperan dalam usaha menciptakan iklim dan sarana yang menunjang agar keluarga dapat menjalankan fungsinya lebih baik, misalnya sistem kerja yang lebih 'fleksibel' bagi wanita, yaitu apabila ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dapat dikerjakan di rumah.

Di Jepang ada undang-undang yang memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menerima kembali para pekerja wanita yang cuti panjang karena alasan mengasuh anak atau mengikuti suaminya pindah ke kota lain.

#### Pertanyaan

##### 2. Staf UNDIP :

Kami memandang perlunya komunikasi dalam keluarga terutama pada era globalisasi saat ini. Kenakalan remaja akhir-akhir ini, dari hasil penelitian diketahui terjadi karena semakin berkurangnya waktu berkomunikasi dalam keluarga. Di samping itu iklan juga mempunyai pengaruh sangat besar pada perilaku anak.

#### Jawaban

##### Prof.Dr. Saparinah Sadli :

Saat ini di Jakarta sudah terdapat perusahaan yang menyediakan dana dalam jumlah besar untuk meningkatkan komunikasi dalam keluarga. Hal yang penting adalah bagaimana agar lebih banyak perusahaan mau menyediakan waktu untuk pelatihan, karena saat ini makin banyak wanita yang masuk ke sektor publik dan arus informasi sangat deras sehingga sulit untuk dibendung.

Iklan dibuat dengan orientasi '*market*', sehingga yang penting adalah bagaimana mengusahakan strategi supaya keluarga bertahan sesuai dengan '*nilai ideal*' tanpa merasa pemerintah ikut campur dalam keluarga. Keluarga harus diberi peranan yang menentukan, tetapi perlu adanya suatu kebijakan/'*policy*' yang mendukung.

**Pertanyaan****3. Staf Kantor Menteri UPW :**

Untuk istilah 'peran ganda' mungkin lebih baik digunakan istilah 'mitra sejajar' (sesuai dengan GBHN). Manakah istilah yang lebih tepat digunakan 'manula', 'lansia', atau 'wulan' (wanita usia lanjut).

**Jawaban****Prof.Dr. Saparinah Sadli :**

Istilah 'mitra sejajar' memang suatu jalan keluar dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam keluarga. Untuk itu perlu adanya sistem komunikasi yang jelas antara suami, isteri dan anggota keluarga lainnya agar terjadi pengertian dan kerjasama yang baik. Ada kesan ketakutan pria tergeser dari publik karena wanita lebih teliti, lebih tekun dan sebagainya. Saat ini janganlah terpaku pada stereotip ini dan hati-hati menggunakannya. Ketakutan ini dapat merupakan kendala untuk mencapai konsep mitra sejajar yang sedang diperkenalkan.

**Dr. Sri Harjati Hatmadji :**

istilah Manula lebih tepat.

**Dr.Ir. Ratna Megawangi, M.Sc. :**

istilah Manula mungkin lebih baik disebut warga senior, artinya suatu figur yang lebih tua, lebih berpengalaman dan harus dihormati.

**Prof.Dr. Saparinah Sadli :**

istilah tidak menjadi masalah, yang penting adalah apa yang dapat dilakukan dengan jumlah manula yang semakin meningkat.

**Pertanyaan****4. Staf IKIP Bandung :**

Secara demografis saat ini jumlah '*single parent*' meningkat (karena cerai/meninggal) dan jumlah '*single parent pria*' juga tidak sedikit. Peran apa yang baik atau apakah ada perbedaan '*single parent pria dan single parent wanita*'.

Bagaimana proyeksi keluarga Indonesia ?

Secara sosial wanita lebih '*powerfull*' dan terdapat tiga hal yang tidak ada pada pria, yaitu: gizi, pendidikan, kesehatan, yang secara kodrat ada pada ibu sehingga peran semakin terdesak.

Perubahan kebiasaan lama umumnya tidak dibicarakan sehingga sering terjadi bentrok dalam keluarga, karena memang belum ada kebudayaan untuk mengeksploitasi peran, yang sering menjadi korban adalah wanita, karena bekerja di luar dan di dalam rumah.

Perlu diikutsertakan pengasuh acara TV untuk membantu melindungi keluarga. Hal ini dapat ditempuh dengan memuat kolom pada majalah Film atau TV (Citra, Bintang, dsb) yang diasuh oleh pakar dan di '*release*' oleh pemerintah dan memuat daftar film yang akan diputar dengan catatan baik untuk anak atau tidak baik untuk anak atau memerlukan bimbingan orang tua, dll. karena tidak semua orang tua tahu acara TV/film tersebut baik atau tidak untuk anak. Cara lain adalah dengan penayangan catatan di atas pada awal acara TV/film yang akan diputar.

#### Jawaban

**Dr. Sri Harjati Hatmadji :**

Istilah '*single parent*' di Indonesia masih belum jelas. "Single parent pria dan wanita" jelas berbeda, namun demikian peran dari orang yang tidak ada akan diambil oleh orang lain yang ada di sekelilingnya.

**Ratna Megawangi :**

Hasil penelitian Koentjaraningrat, wanita yang bercerai dan punya anak akan kembali kepada orang tuanya. Oleh karena itu statistik mengenai '*single parent*' untuk Indonesia masih kabur.

Proyeksi keluarga dan SDM Indonesia di masa mendatang sangat tergantung pada usaha-usaha pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Dengan berubahnya jaman dan pola asuh dalam keluarga, maka perlu diadakan suatu penelitian mengenai dampak perubahan pola asuh terhadap kepribadian anak.

## DISKUSI SESI III

## Pertanyaan

## 1. Lorentz Bagus/Universitas Tarumanegara :

Pemerintah menggebu-gebu agar masyarakat menerima norma keluarga kecil, apakah hal ini sebenarnya hanya alat pembangunan, seperti di Yunani Kuno, Betulkah demikian ?

Keluarga tidak mampu menghadapi serangan dari luar akibatnya timbul kumpulan-kumpulan, seperti remaja mesjid, yang lebih memuaskan hati kaum muda. Di sisi lain anak bertemu orang tua hanya dalam jangka waktu yang sedikit sekali. Bagaimana hubungan antara keluarga dengan kelompok-kelompok alternatif tersebut bisa dibina ?

Saya kurang setuju dengan pendapat Bapak Haidar, bahwa perubahan ini seolah-olah sudah tidak terkendali oleh manusia pada abad 21, karena dari era pra industri kita akan melonjak pada era post industri.

Perubahan tidak akan terjadi dalam keadaan kosong, karena masih terkendali oleh budaya, adat istiadat dan agama. Khususnya pada agama Islam masih terpaku pada keluarga '*mawaddah, sakinah, rahmah*', bagaimana kita menjabarkan di abad industrialisasi ?

Kepada Bapak Alex, saya kira dampak P4 sudah terlihat pada kehidupan beragama, dengan tantangan yang makin keras kehidupan beragama justru semakin mantap. Tetapi dampak tersebut sulit dilihat secara individu.

Kepada Bapak Kartono, di dalam globalisasi, yang berubah lembaga atau fungsi keluarga. Menurut pendapat saya hanya beberapa fungsi saja yang berubah.

## Jawaban

## Ir. Haidar Bagir, MA. :

Teori Hegemoni bahwa sesungguhnya masyarakat manusia berada dalam satu cengkeraman kekuasaan yang tidak bisa didobrak/hegemoni, dan pandangan ini bertentangan dengan Islam.

Islam percaya bahwa dorongan kebaikan dalam diri manusia akan menang menghadapi serangan apa pun. Saya tidak percaya ada sekelompok masyarakat yang secara sengaja menggoyahkan sendi-sendi keluarga. Marxisme tidak pernah berkuasa pada sebagian besar dunia. Telah terjadi ekses yang menggoyahkan sendi keluarga akibat tidak mampu menahan ekses dari suatu kegiatan yang bertujuan baik.

Ekses tersebut luar biasa, tidak terkendali, sehingga manusia kebingungan. Agama dapat mengembalikan keadaan pada rel yang sebenarnya/meluruskan kembali dengan adanya kelompok-kelompok misalnya pemuda mesjid. Kita mengalami tantangan serius dan membutuhkan energi besar untuk melawan tantangan yang menggoyahkan institusi keluarga.

**Dr. Alex Paat :**

Pertanyaan hidup :

1. Mengapa hidup ?
2. Mengapa hidup untuk menderita ?
3. Apa itu kebenaran ?
4. Ada apa setelah pernikahan, yaitu kematian ?

Agama menjawab pertanyaan tentang hidup tersebut. Pembangunan mestinya Pengamalan Pancasila, yang intinya harkat martabat manusia.

Manusia punya hak azasi yang salah satunya memilih jodoh; masyarakat hanya membantu. Dalam hidup berkeluarga, masing-masing punya hak azasi maka sederajatlah pria dan wanita dalam harga menghargai. Suami isteri sudah menyatu dalam fisik maupun hidup spiritual, sehingga semuanya saling terbuka. Keterbukaan menyebabkan tidak ada istilah uang suami atau uang isteri. Uang sumber curiga dan menyebabkan bencana jika tiada ada keterbukaan.

Keterbukaan lain untuk ketahanan keluarga adalah waktu. Pencopotan topeng-topeng; jangan bersandiwara dalam kehidupan keluarga. Komunikasi agar terjadi penyesuaian dengan adanya pengendalian diri:

1. Pengaturan waktu
2. Keterbukaan uang
3. Pencopotan topeng-topeng sandiwara
4. Perubahan diri sikap keluarga
5. Keterlibatan sosial

**Dr. Kartono Muhammad :**

NKBBS demi pembangunan ada benarnya dan tak ada salahnya, yang penting pembangunan ditujukan untuk siapa. Selama pembangunan ditujukan pada manusia seutuhnya tidak ada salahnya NKBBS digalakkan demi pembangunan. Mungkin ada persepsi KB akan membatasi jumlah penduduk; pembatasan jumlah penduduk akan terjadi dengan sendirinya tanpa KB, tetapi mungkin pada saat keadaan sudah sangat terlambat karena jumlah penduduk sudah sangat besar dibandingkan daya dukung bumi



Indonesia. Program KB ditujukan untuk mempercepat proses perubahan demografi tersebut.

Arus informasi sampai juga ke desa melalui TV, radio, dan sebagainya dan menjangkau generasi muda. Yang terpenting adalah menyiapkan mereka dalam menghadapi era globalisasi sehingga kelak mereka mampu menjadi orang tua yang bertanggung jawab pada Tuhan, masyarakat dan keluarga.

Di Indonesia lembaga keluarga akan tetap ada karena dijaga oleh hukum. Saya pernah mendengarkan diskusi dengan Rhoma Irama dan ia dengan tegas menyatakan bahwa isteri tidak boleh bekerja, harus di rumah menurut Islam dan bukan menurut dirinya. Persepsi seorang terhadap penafsiran ajaran agama disahkan sebagai pandangan agama tentu saja sangat membahayakan dan pakar-pakar agama disiapkan untuk menghadapi perubahan tersebut dengan pedoman yang benar sesuai dengan apa yang harus dilakukan umat.

#### Pertanyaan

##### 2. Staf FISIP UI :

Saya melihat tayangan lagu di TV yang dikumandangkan Rhoma Irama, yang syairnya berbunyi: "*Seindah-indahnya perhiasan adalah isteri yang saleh*". Digambarkan isteri mencium tangan suami, membukakan sepatu, menyuapi makanan sambil terus tersenyum manis. Apakah ini merupakan gambaran keluarga dari sudut Islam yang harus diterima, tentu saja hal ini sangat menyenangkan kaum pria, tetapi tidak menyenangkan kaum wanita. Padahal kita sedang mengusahakan kemitraansejajar. Hal di atas menggambarkan ketimpangan.

Kepada Bapak Paat yang mengatakan jika ibu berkarir apakah gajinya harus diserahkan. Saya pikir dalam kehidupan berkeluarga tidak ada lagi ini gajimu-ini gajiku, melainkan harus bersama-sama menghadapi kebutuhan keluarga. Kalau isteri tidak bekerja, sangat tergantung kepada suami dan lebih bebas menggunakan uang demi kepentingan keluarga.

#### Jawaban

##### Ir. Haidar Bagir, MA. :

Clips tersebut bukan hanya ibu-ibu, melainkan sebagian besar pria muslim. Dilihat dari semua sumber nilai Islam bukan seperti itu. Nabi Muhammad mengerjakan semua kebutuhannya sendiri, berbelanja, memasak, menjahit, membetulkan terompah. "*Domestic Works*" dalam Islam bukan monopoli

kaum wanita, kadang-kadang bercampur aduk dengan tradisi. Sebenarnya penempatan wanita yang lebih rendah dari laki-laki adalah buatan dari masyarakat yang dominan laki-laki. Nabi sering mencium tangan anaknya Fatimah yang sering disebut sebagai Ummu Abiha (ibu ayahnya) di banyak kesempatan secara demonstratif. Contoh lain Ali bin Abu Thalib menganggap suksesi itu diberikan kepadanya, sekelompok lain memilih Abubakar. Fatimah termasuk bertahan untuk mengakui untuk tidak mengakui kepemimpinan Abubakar, dan Ali memelihara perasaan isterinya untuk menunda pengakuan kepemimpinan Abubakar hingga Fatimah meninggal. Malam demi malam Ali menuntun onta yang ditunggangi Fatimah untuk menyadarkan masyarakat akan hak politik Ali.

**3. Pertanyaan tertulis :**

Masalah keluarga dewasa ini banyak dihadapi oleh masyarakat kota golongan menengah ke atas dan bukan menyangkut aspek material, tetapi lebih berhubungan dengan aspek internal dalam keluarga. Bagaimana bentuk komunikasi interaksi yang terbaik untuk mereka ? Bagaimana masyarakat pedesaan, bagaimana pendapat panelis agar mereka lebih dapat meningkatkan komunikasi internal dengan keluarga ?.

**Pertanyaan**

**4. Salim Mahasiswa FPS :**

Akhir-akhir ini banyak dipersoalkan kawin dengan lain agama, tetapi dibalik itu timbul dampak-dampak negatif dari pihak keluarga masing-masing, yang akhirnya seringkali berdampak pada perceraian.

**Jawaban**

**Ir. Haidar Bagir, MA. :**

Sampai pada beberapa dasawarsa yang lalu diyakini bahwa pria muslim boleh mengawini wanita 'ahlul kitab' sebaliknya wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki non muslim. Belakangan ini ada upaya untuk reinterpretasi terhadap hukum ini. Menurut kelompok ini, laki-laki mengemban kepemimpinan tradisional dalam keluarga karena Allah lebihkah atas perempuan, sehingga wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki non muslim akan mengalami konflik.

Islam sampai batas tertentu menekankan pada kelestarian perkawinan sampai mati. Perceraian dibolehkan Allah tetapi dibenci. Jika seorang

suami mendapati hal-hal yang tidak beres pada isterinya, dimohonkan agar bersabar lebih dahulu, mudah-mudahan ada jalan kebaikan sebelum kata "cerai" diucapkan.

**Dr. Alex Paat :**

Menghadapi era globalisasi, makin tinggi terjadinya perkawinan campur berdasar hak azasi. Azasi membawa resiko, dari sudut pandang Kristen Katolik, agama harus membantu seseorang pada saat akan menikah, dispensasi, perkawinan campur dibantu masing-masing setia dalam keyakinan.

Perceraian tinggi sekali di tahun-tahun terakhir, akibat berbagai hal sosial, psikologis, ekonomi.

Intinya: apa yang diikat Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, dan ini merupakan hukum Illahi, sehingga tidak ada alasan apapun manusia boleh cerai.

## DISKUSI SESI IV

### Pertanyaan

1. **Bohar Soeharto (IKIP Bandung) :**

Pemikiran apa yang ingin diharapkan dari program Menteri Negara UPW sehubungan dengan adanya penegasan bahwa tugas ibu adalah sebagai seorang pendidik yang pertama dan utama ?

### Jawaban

**Ir. Supardan, Asmen Meneg UPW :**

Dewasa ini program peningkatan kualitas SDM sedang dikembangkan secara besar-besaran oleh Pemerintah yaitu dengan memberikan kemampuan, kesadaran, ketrampilan kepada kaum ibu untuk mengasuh dan mendidik anak sedini mungkin agar anak tumbuh dan kembang secara optimal dan menyeluruh. Program yang sudah dikembangkan di seluruh Indonesia adalah program bina keluarga yang sasarannya tidak hanya ibu, tetapi juga anggota keluarga lainnya dalam rangka mengasuh dan mendidik anak baik pada aspek fisiknya maupun aspek nonfisik. Program ini dilakukan dengan cara memberikan stimulasi atau rangsangan pada anak baik dari segi fisik, intelektual, emosional, maupun sosial dari anak tersebut. Untuk hal ini telah dilakukan dengan menggunakan alat-alat permainan edukatif (APE) yang sekarang sudah dikembangkan di 54.000 kelompok. Pola ini merupakan program untuk ibu terutama bagi strata golongan ekonomi bawah yang berupa penyuluhan kepada ibu serta anggota rumah-tangga lainnya.

### Pertanyaan

2. **Rini Hardjono (BKKBN Pusat) :**

Karena semakin banyak wanita yang berperan sebagai isteri juga sebagai wanita karir, maka sekarang ini wanita sudah dianggap sebagai mitra seajar kaum pria. Akan tetapi kecenderungan menunjukkan bahwa seorang wanita karir harus mengikuti ke mana saja suaminya pergi. Sebagai contoh, seorang wanita karir yang juga pegawai negeri sering terpaksa melepas jabatannya karena mengikuti suami. Adakah sesuatu yang dapat dilakukan oleh kantor UPW terhadap situasi wanita pegawai negeri (PN) seperti yang disebutkan tadi?

**Jawaban**

**Ir. Supardan, Asmen Meneg UPW :**

Sebetulnya tidak ada peraturan pemerintah yang diskriminatif terhadap PN wanita maupun PN pria. Tidak ada suatu peraturan pemerintah yang mengharuskan bahwa wanita karir harus mengikuti ke mana suaminya pergi. Suatu keputusan yang diambil bahwa seorang ibu mengikuti suaminya adalah keputusan bersama antara suami dan isteri. Keputusan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan suami isteri tetapi juga atas dasar kepentingan anak. Oleh karena itu apa pun yang dilakukan adalah keputusan bersama. Kalau pun isteri harus melepas jabatannya, itu sudah berdasarkan kesepakatan dan sepengetahuan bersama.

Maka dianjurkan oleh kantor UPW agar jangan ada peraturan yang dalam pelaksanaannya diskriminatif. Kadang-kadang wanita sendiri yang membatasi dirinya, misalnya pada saat diserahi pekerjaan yang lebih luas dia menolak karena dikaitkan dengan kepentingan keluarganya.

**Pertanyaan**

**3. Tri Mumpuni :**

- a. Kejadian yang terlihat di masyarakat memang merupakan kasus per kasus. Saya setuju tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita, tetapi begitu sudah memasuki jabatan tertentu mengapa kaum pria selalu memperoleh prioritas utama ?
- b. Ada suatu penelitian yang melaporkan bahwa Dharma Wanita pada strata tertentu dalam masyarakat berpengaruh negatif terhadap produktivitas wanita, yang sebenarnya bisa digunakan untuk kegiatan lainnya misalnya untuk menambah ekonomi keluarga ?
- c. Kondisi kaum wanita di Indonesia sulit digeneralisir karena masing-masing golongan mempunyai kebutuhan atau masalah sendiri. Kebijakan apa yang diluncurkan oleh Kantor Menteri UPW untuk menjawab seluruh aspirasi para wanita ? Apakah sudah ada forum tertentu yang mampu menjawab seluruh aspirasi wanita yang beragam tersebut ?

**Jawaban**

**Ir. Supardan, Asmen Meneg UPW :**

Memang peranan wanita menyangkut seluruh strata, oleh karena itu Kantor Menteri Negara UPW memikirkan prioritas kepada:

- Wanita-wanita dari keluarga berpenghasilan rendah yang mengalami berbagai kekurangan dan hambatan.

- Wanita remaja (usia 15-29 tahun), merupakan tenaga yang masih aktif baik dari segi reproduksi maupun produksi.
- Wanita-wanita yang karena sesuatu hal menjadi kepala keluarga (KK) sekaligus sebagai ibu rumahtangga bukan karena perceraian tetapi karena ditinggal mati atau sebab lain misalnya suaminya sebagai KK berada di suatu daerah lain dalam waktu yang lama, dan mereka mempunyai status sosial ekonomi yang memprihatinkan.
- Tenaga kerja wanita baik di dalam atau di luar negeri yang keterampilan dan berpendidikan rendah. Wanita dari strata menengah ke atas tidak perlu mendapat perhatian khusus karena mereka sudah bisa mengembangkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu program-program tentang peranan wanita dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Dalam hal ini Kantor Menteri Negara UPW mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi melalui pusat-pusat studi wanita.

Pusat-pusat studi wanita tersebut harus bisa dan mampu melakukan:

1. Analisis studi wanita di daerah, dan untuk hal ini sudah dikeluarkan pedoman-pedoman.
2. Penelitian-penelitian setempat mengenai situasi wanita di daerah-daerah tersebut.
3. Semacam pusat studi untuk mengembangkan kepedulian, wawasan, maupun ketrampilan yang disebut "*gender responsible planning*". Hendaknya program tidak hanya tertumpu pada hal-hal khusus untuk wanita saja, tetapi harus dapat mengintegrasikan aspirasi, kepentingan dan peranan wanita dalam semua program pembangunan dengan memperhatikan tercapainya 4 hal, yakni:
  - partisipasi aktif wanita
  - bagaimana wanita sebagai isteri/KK/karir ikut menikmati hasil pembangunan.
  - akses dan kontrol wanita terhadap SDM.
  - kesejahteraan wanita dan keluarga.

Hal-hal ini yang akan dikembangkan di masa mendatang khususnya pada Pelita VI.

## DISKUSI SESI V

## Pertanyaan

## 1. Staf Universitas Tarumanegara :

Apa yang menjadi kriteria/indikator dari keluarga sejahtera di Indonesia ?

## Jawaban

## Dr.Ir. Hidayat Syarief, MS. :

Secara umum, kesejahteraan keluarga harus meliputi kriteria kesejahteraan material spiritual yang seimbang. Kita tak menginginkan suatu bentuk masyarakat yang sejahtera material tetapi kesejahteraan spiritualnya lemah. Oleh karena itu, perlu dirinci karakteristik dari keluarga sejahtera secara material dan secara spiritual.

Memang pada saat sekarang banyak anak-anak atau generasi penerus yang hanya tahu menikmati hasilnya tanpa mengetahui beratnya perjuangan. Masalah ini menyangkut penanaman nilai-nilai dan penanaman cinta tanah air dan cinta bangsa. Oleh karenanya, pendidikan dalam keluarga yang dilakukan sejak dini dan pendidikan di sekolah/luar sekolah menduduki tempat yang sangat penting dalam menghadapi masalah perubahan-perubahan nilai pada generasi penerus.

## Pertanyaan

## 2. Staf BKKBN Pusat :

Sejauh mana faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga ?

## Jawaban

## Dr.Ir. Hidayat Syarief, MS. :

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah sesuatu yang netral, bisa berpengaruh positif dan bisa juga negatif terhadap kesejahteraan keluarga. Perlu dirumuskan cara-cara pendayagunaan IPTEK yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

IPTEK berkaitan pula dengan aspek Sosial Budaya. Kehidupan kita kompleks dan satu sama lain terkait. IPTEK yang tinggi menghasilkan arus informasi yang cepat yang membawa budaya dan nilai-nilai yang mungkin berbeda dengan budaya dan nilai-nilai yang kita anut.

**Pertanyaan****3. Staf FISIP UI :**

Bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi kesejahteraan keluarga ?

**Jawaban**

**Dr.Ir. Hidayat Syarief, MS. :**

Terjadinya kemiskinan-kemiskinan di pedesaan memang salah satunya adalah karena keterbatasan sumberdaya alam. Perlu dicarikan upaya penanggulangan kemiskinan ini. Kita perlu bersama-sama mencari itu melalui penelitian atau pengkajian terhadap beberapa faktor yang menimbulkan masalah kemiskinan di pedesaan, misalnya faktor pemilikan modal, sikap dan daya juang, persepsi, akses terhadap fasilitas sosial, tingkah laku, dan lain-lain.

**Pertanyaan****4. GMSK-IPB :**

Mengapa kebijakan no.4, yaitu Strategi KIE baik untuk menangani masalah gizi kurang atau gizi lebih disatukan, padahal kedua masalah tersebut sangat berbeda ?

Sejauh mana konglomerat dilibatkan dalam penanggulangan masalah gizi ? Di samping itu perlu juga dilibatkan produsen makanan (fast food, makanan kaleng, makanan kemasan) untuk turut serta dalam penyediaan dana penelitian maupun program-program KIE melalui media massa, dll.

**Jawaban**

**Sunarno, SKM., MPH. :**

Sasaran penyuluhan gizi untuk penanggulangan masalah gizi kurang dan gizi lebih memang berbeda. Akan tetapi strategi cara pencegahan timbulnya kedua masalah tersebut bersifat universal. Yang berbeda mungkin upaya-upaya intervensi/program untuk menangani masalah gizi tersebut, sehingga dalam kebijakan pengembangan strategi KIE untuk menanggulangi masalah gizi kurang dan gizi lebih disatukan.

Upaya mengikutsertakan para produsen makanan itu memang perlu. Dalam Repelita VI, upaya peningkatan mutu gizi dari makanan yang diproduksi dari pabrik/produsen, sehingga keikutsertaan produsen diharapkan besar sekali. Sekarang sedang dirintis upaya peningkatan mutu tepung terigu, dan untuk peningkatan mutu bahan pangan lainnya akan menjadi tanggung jawab produsen.



Pendekatan-pendekatan dimulai dengan menyadarkan produsen dalam upaya peningkatan mutu gizi makanan. Departemen Kesehatan mengambil kebijakan bahwa makanan yang beredar dari pabrik harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu: aman, (bebas dari cemaran, penyakit, bahan aditif yang berbahaya), mengandung gizi, dan dibenarkan dari segi agama.

**Ir. Sarwititi S. Agung, MS. (Tim PSW) :**

Mengingat kesibukan dalam mengembangkan usaha bagi para ibu peserta UPPKA sehingga tidak punya waktu ke POSYANDU maka disarankan agar pertemuan kelompok UPPKA usaha produktif sekaligus dimanfaatkan untuk penyuluhan gizi dan kesehatan.

**Pertanyaan**

**5. Staf BKKBN Pusat :**

Benarkah dengan meningkatnya jumlah lansia urbanisasi juga meningkat ? Mengapa target UPGK hanya ukuran fisik tinggi badan, bagaimana dengan berat badan ? Mengapa ukuran berat badan pada balita bukan merupakan prioritas ? Apa dasarnya ?

**Jawaban**

**Sunarno, SKM., MPH :**

Tinggi badan dipakai untuk mengukur status gizi pada jangka waktu yang lama. Hal ini diperlukan untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam bidang pangan dan gizi. Pengukuran berkala setiap 3 atau 5 tahun pada anak-anak yang baru masuk Sekolah Dasar akan dilakukan yang tujuannya adalah untuk melihat status gizi pada masa-masa yang lalu.

Berat badan juga dipakai terutama untuk melihat status gizi masa sekarang, juga dikaji untuk melihat perubahan-perubahan suatu program dalam jangka pendek. Sedangkan pengukuran berat badan sekarang lebih diperlukan pada anak-anak balita (bawah tiga tahun) karena golongan ini yang tingkat morbiditasnya tertinggi. Selain itu, anak balita usia 4-5 tahun sudah agak sulit untuk ditimbang. Monitoring untuk balita akan dikembangkan melalui sekolah-sekolah TK (Taman Kanak-kanak).

**Pertanyaan****6. Staf GMSK-IPB :**

Hasil penelitian Tim GMSK membuktikan bahwa jumlah anak peserta UPPKA lebih banyak daripada bukan peserta. Untuk mencapai tujuan UPPKA maka perlu dilakukan seleksi yang lebih ketat bagi calon penerima kredit, yaitu jangan hanya yang sudah beranak banyak dan berusia lebih tua. Yang harus diberi peluang adalah yang berusia lebih muda, usia subur, masih panjang, dan masih produktif.

Saran untuk BKKBN yang menyelenggarakan program UPPKA.

Suatu kegiatan usaha produktif sangat tergantung pada modal, alat produksi, pemasokan bahan mentah, proses produksi, pemasaran, dan manajemen. Dari berbagai penelitian ditemukan banyak kendala, misalnya sulitnya pemasokan bahan mentah. Oleh karena itu untuk program UPPKA perlu dicarikan bentuk kegiatan usaha produktif yang menggunakan bahan baku yang belum dimanfaatkan di suatu daerah, sehingga kontinuitas pasokan bahan baku terjamin dan produksi berjalan lancar.

**Jawaban****Ir. Sarwititi S. Agung, MS. (Tim PSW) :**

Sebetulnya program UPPKA yang merupakan program yang sudah diintegrasikan pada program ini jangan dilihat terpisah dengan program-program posyandu lainnya. Program UPPKA ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang selanjutnya akan menunjang tujuan program gizi dan kesehatan secara umum.

Mengenai jumlah anak peserta UPPKA lebih banyak daripada bukan peserta, hal ini perlu ditelaah lebih lanjut. Apakah hasil penelitian tersebut telah dikontrol dengan umur ibu. Mungkin saja ibu yang tak mengikuti program ini pada dasarnya memang sudah mempunyai anak banyak. Seleksi pemakaian kredit memang perlu untuk ditingkatkan. Kesulitan pada pelaksanaannya adalah pengurus cenderung memberikan pada orang yang sudah dikenal, atau orang-orang yang memang membutuhkannya tanpa melihat usianya.

## DISKUSI SESI VI

## Pertanyaan

## 1. Kasmiyati, Staf BKKBN Pusat :

Untuk Ibu Pujiwati -- Variabel apa saja yang dapat diungkap di dalam faktor kerja fisik, transaksi sosial, ekonomi dan kultural ?

Untuk Ibu Syamsiah Ahmad -- Salah satu indikator pola pikir berwawasan gender, adalah pelestarian pengembangan dan apresiasi budaya. Apa ukurannya ? Secara kualitatif wanita lebih berperan terhadap penyiapan SDM, apa maksud pernyataan ini ?

## Jawaban

## Prof.Dr. Pudjiwati Sajogyo :

Ukuran-ukuran: Ekonomis, psikologis dan kultural.

Ekonomis: Kerja dengan mendapat upah tertentu.

Psikologis: Penilaian terhadap pekerjaan yang cocok untuk gender tertentu, misalnya jaga malam yang secara psikologis cocok untuk pria.

Kultural: Penilaian terhadap pekerjaan karena adanya kebiasaan. Ada pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh wanita saja atau pria saja. Contohnya pekerjaan yang berat-berat untuk pria.

## Dra. Syamsiah Achmad, MA. :

a. Indikator untuk pengembangan dan pelestarian budaya diukur dengan keterlibatan waktu wanita untuk mengapresiasi budaya. Pengembangan apresiasi budaya harus dilihat sejauh mana wanita telah ikut berperan dalam pengembangan budaya, terutama pada zaman yang terus berubah.

b. Wanita yang secara kuantitatif lebih dari ½ jumlah penduduk berperan dalam pengembangan SDM. Kehamilan dan penyusuan anak adalah tugas utama ibu. Peran ibu dalam penyiapan generasi mendatang dalam hal ini jelas dominan. Kemudian hubungan erat antara ibu dan suami juga merupakan modal utama untuk pembinaan SDM.

c. Ada tiga macam tugas keluarga (hasil riset dunia)

1. Domestic work : tugas rumah tangga

2. Tanggung jawab orangtua (parental responsibility), pembinaan SDM -- generasi mendatang.

3. Tanggung jawab keluarga lainnya seperti perayaan adat dan hubungan antar keluarga adalah tanggung jawab keluarga juga.

Mayoritas tugas-tugas tersebut masih dilakukan oleh wanita. Oleh karena itu perlu diperkenalkan pembagian tugas rumah tangga antara pria dan wanita.

**Pertanyaan**

**2. Fitri, Staf ISIKI Palembang :**

Bagaimana mengukur kualitas hidup dalam rangka mengentaskan kemiskinan ?

**Jawaban**

**Prof.Dr. Selo Sumardjan :**

Kebetulan saya ikut proyek NKKBS, untuk mengukur keluarga sejahtera: Ukuran sejahtera ada 3 kategori:

- a. Kebutuhan Dasar untuk survival terpenuhi.
- b. Kebutuhan sosial budaya (social needs) terpenuhi, untuk ini perlu pendidikan
- c. Kebutuhan untuk mengembangkan diri, yaitu akses terhadap sumber modal & tabungan. Tingkat pendidikan terutama spesialisasi tertentu baik formal maupun non formal sangat diperlukan.

Ketiga kategori ini harus dijabarkan dengan variabel-variabel pengukurannya.

**Pertanyaan**

**3. Ibu Siti Hidayati Amal, Staf FISIP-UI :**

Untuk Prof. Selo Sumardjan -- Berdasarkan hasil sebuah penelitian mahasiswa, ditemukan bahwa pada masyarakat kalangan bawah ternyata suami tidak melakukan pekerjaan rumah tangga. Ini berbeda dengan pemaparan pada makalah Bapak, bagaimana menurut pendapat Bapak ?

**Jawaban**

**Prof.Dr. Selo Sumardjan :**

Pengalaman empirik hasil penelitian mahasiswa tersebut hanya berlaku untuk daerah yang diteliti. Untuk daerah lainnya mungkin berbeda.

Ada dua faktor yang berperan dalam menentukan pola interaksi Kepala Keluarga dan Kepala Rumah tangga.

1. Status sosial (gengsi)
2. Keperluan hidup ekonomis keluarga.

Dalam keadaan mempertahankan status sosial dan keadaan ekonomi yang tidak ada masalah, kepala rumahtangga akan lebih banyak memberikan waktunya untuk peningkatan status sosial, misalnya mendampingi suami di sektor publik.

Pada keluarga yang kaya, keperluan ekonomi pribadi tidak terlalu dipikirkan lagi. Kerja keras yang terus dilakukan oleh kepala keluarga, biasanya untuk kepentingan perusahaan, dan status sosialnya akan meningkat.

Pada kelas menengah ada keseimbangan antara status sosial dan kepentingan ekonomi. Ibu diperbolehkan untuk menambah '*income*'. Wanita lebih bebas bergerak di sektor publik. Tingkat pendidikan pria dan wanita seimbang.

Pada kelas bawah status sosial tidak terlalu dipentingkan, tetapi yang lebih dipentingkan adalah '*survival*' keluarga. Ibu dan suami bersama-sama mencari nafkah.

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

## LAMPIRAN. 1. SUSUNAN PANITIA SEMINAR

<b>PENASEHAT</b>	: Rektor IPB, Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN. Deputi SDM, BAPPENAS.
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	: Dr. Ir. Sjafrida Manuwoto. (Dekan Fakultas Pertanian, IPB)
<b>PANITIA PENGARAH</b>	
Ketua	: Ir. Amini Nasoetion, MS - IPB
Anggota	: 1. Drs. Sudarmadi - BKKBN 2. Prof. Dr. Soekirman - BAPPENAS 3. Sjamsiah Achmad, MA. - UPW 4. Prof. Dr. Ir. Pudjiwati Sajogyo 5. Ir. Suprihatin Guhardja, MS. 6. Dr. Ir. Hidayat Syarief, MS. 7. Dr. Ir. Ratna Megawangi, MSc.
<b>PANITIA PELAKSANA</b>	
Ketua	: Dr. Ir. Ratna Megawangi, M.Sc.
Wakil Ketua	: Ir. Hartoyo, M.Sc.
Sekretaris I	: Ir. Cesilia Meti D.
Sekretaris II	: Ir. Lilik Kustiyah
Bendahara I	: dr. Yekti H. Effendi
Bendahara II	: Ir. Nino Yayah S.
<b>SEKSI-SEKSI</b>	
Makalah & Prosiding	: Ir. Diah K. Pranaji, MS. Ir. Drajat Martianto Ir. Ikeu Tanziha, MS. Ir. Sri Rihati Kusno
Publikasi dan Dokumentasi	: Ir. Budi Setiawan, MS. Ir. Ahmad Sulaeman
Acara, Persidangan dan Notulis	: Drh. Asep Rustiawan, MS. Ir. Ikeu Ekayanti
Konsumsi	: Ir. Dwi Hastuti Ir. Euis Sunarti Yati Sofyati
Logistik dan Transportasi	: Ir. M.D. Djamaludin, M.Sc. Ir. Eddy Setyo Mudjajanto Lili Sarwali

## LAMPIRAN 2. DAFTAR PESERTA SEMINAR

NO.	N A M A	I N S T A N S I
1.	Prof.Dr.Yaumil C.Agus Achir	Asisten MENPENDUDUK
2.	Drs. M. Soedarmadi	Deputy Bid.Pengembangan Program BKKBN
3.	Dra. Hadriah Oesman, MS	Pusat Studi Biomedis dan Reproduksi Manusia BKKBN
4.	Dra. Dwi Wahyuni	BKKBN
5.	Drs. Edy Purwanto	BKKBN
6.	Dra. Maria Anggraeni, MS	BKKBN
7.	Dra. Ida Ayu Sriudiyani	BKKBN
8.	Dra. Iswarati, SU	BKKBN
9.	Jonhar Johan, MSc.	BKKBN
10.	Dra. Kasmiyati, MSc.	BKKBN
11.	Drs. Muhamad Dawam, MPA	BKKBN
12.	Drs. Nico Wellikan	BKKBN
13.	Ir. Rindang Ekawati, MSc.	BKKBN
14.	Drs. Soewijanto	BKKBN
15.	Dra. Sylvia Pangemanan, MA	BKKBN
16.	Dr. Tohir Diman, MA	BKKBN
17.	Drs. Sugihartatmo, MPIA	BKKBN
18.	dr. Rihna A. Azwar	KaPus Pengembangan Kebi- jaksanaan KB Nasional
19.	H. Tatang S.W.	Kepala BKKBN Kodya Bogor
20.	Titta A.T.	Kepala BKKBN Kab. Bogor
21.	Ade Hidayati	BKKBN
22.	Dra. Rieny Hardjono, MPA	Biro Pendidikan KB BKKBN
23.	Suprpto, MPhil.	BKKBN
24.	Eddy Soetopo	BKKBN
25.	Dr.Ir. Syafrida Manuwoto	Dekan Faperta, IPB
26.	Prof.Dr. Kuntjoro	PD I Faperta IPB
27.	Dr.Ir. Syafri Mangkuprawira	LPM, IPB
28.	Prof.Dr. Pudjiwati Sayogyo	PSW, LP - IPB
29.	Prof.Dr. Suhardjo, M.Phil	PSKPG LP-IPB
30.	Dr.Ir. Hidayat Syarief, MS	GMSK, FAPERTA IPB
31.	Dr.Ir. Ratna Megawangsi, MSc.	GMSK, FAPERTA IPB
32.	Dr.Ir. Sri Utami Kuntjoro	PSKPG, LP - IPB
33.	Dr.Ir. Aida Vitayala	SOSEK, FAPERTA IPB
34.	Ir. Amini Nasoetion, MS	GMSK, FAPERTA IPB
35.	Dr.Ir. Sudjana Sibarani, MSc.	GMSK, FAPERTA IPB
36.	Ir. Suprihatin Guhardja, MS	GMSK, FAPERTA IPB



NO.	N A M A	I N S T A N S I
37.	Ir. Ahmad Sulaeman	GMSK, FAPERTA IPB
38.	Dr.Ir. Ali Khomsan, MS	GMSK, FAPERTA IPB
39.	Drh. Asep Rustiawan, MS.	GMSK, FAPERTA IPB
40.	Ir. Budi Setiawan, MS	GMSK, FAPERTA IPB
41.	Ir. Cesilia Meti Dwiriani	GMSK, FAPERTA IPB
42.	Dr.drh. Clara Kusharto, MSc.	GMSK, FAPERTA IPB
43.	Ir. Diah K. Pranadji, MS	GMSK, FAPERTA IPB
44.	Ir. Djiteng Roedjito, DA. Nutr.	GMSK, FAPERTA IPB
45.	Ir. Drajat Martianto	GMSK, FAPERTA IPB
46.	Ir. Dwi Hastuti Martianto	GMSK, FAPERTA IPB
47.	Ir. Eddy Setyo Mudjajanto	GMSK, FAPERTA IPB
48.	Dra. Emma S. Wirakusumah, MSc.	GMSK, FAPERTA IPB
49.	Ir. Emmy S. Karsin, MS	GMSK, FAPERTA IPB
50.	Ir. Euis Sunarti	GMSK, FAPERTA IPB
51.	Ir. Evy Damayanthi, MS	GMSK, FAPERTA IPB
52.	Ir. Faisal Anwar, MS	GMSK, FAPERTA IPB
53.	Ir. Hadi Riyadi, MS	GMSK, FAPERTA IPB
54.	Hartanti Santoso, M.Sc.	GMSK, FAPERTA IPB
55.	Ir. Hartoyo, MSc.	GMSK, FAPERTA IPB
56.	Ir. Hepi Hapsari	GMSK, FAPERTA IPB
57.	Ir. Ikeu Ekayanti	GMSK, FAPERTA IPB
58.	Ir. Ikeu Tanziha, MS	GMSK, FAPERTA IPB
59.	Ir. Lilik Kustiyah	GMSK, FAPERTA IPB
60.	Ir. Liliek Noor Yuliati	GMSK, FAPERTA IPB
61.	Dr. Ir. M.A. Chozin	BDP, FAPERTA IPB
62.	Ir.M.D. Djamaludin, MSc.	GMSK, FAPERTA IPB
63.	Ir. Melly Latifah	GMSK, FAPERTA IPB
64.	Ir. M. Khumaidi, MSc.	GMSK, FAPERTA IPB
65.	Ir. Nino Yayah Sa'diyah	GMSK, FAPERTA IPB
66.	Ir. Retnaningsih	GMSK, FAPERTA IPB
67.	Dr.Drs. Rimbawan	GMSK, FAPERTA IPB
68.	Ir. Siti Madanijah, MS	GMSK, FAPERTA IPB
69.	Ir. Sri Anna Marliyati	GMSK, FAPERTA IPB
70.	Ir. Sri Rihati Kusno	GMSK, FAPERTA IPB
71.	Ir. Sugiah Machfud, MS	PSW, LP - IPB
72.	Dr. Ir. Ujang Sumarwan, MSc.	GMSK, FAPERTA IPB
73.	Ir. Umar A.S. Tuanaya	SOSEK, FAPERTA IPB
74.	dr. Vera Urip Subandrio	GMSK, FAPERTA IPB
75.	Dra. Winati Wigna, MS	PSW, LP-IPB
76.	Ir. Yayuk Farida B., MS.	GMSK, FAPERTA IPB
77.	dr. Yekti H. Effendi	GMSK, FAPERTA IPB
78.	Ir. Juniar Atmakusuma, MS	Jur. SET-FAPET IPB

NO.	N A M A	I N S T A N S I
79.	Ir. Gunardi, MA	Kepala Lab. Penyuluh Pertanian SOSEK IPB
80.	Ir. Henny Windarti	LSI IPB
81.	Dra. Lies D. Karyadi, MS	GMSK FAPERTA IPB
82.	Dra. Rahayu Dewi	S2 GMK IPB
83.	Dra. Ratna Wilis, Apt.	S2 GMK IPB
84.	dr. A. Aris Susanto, MS	S3 GMK IPB
85.	Drs. Muh. Saleh Buchari, BM	S2 GMK IPB
86.	Ir. Titi Riani	GMSK FAPERTA IPB
87.	Ir. Yayat Heryatno	GMSK FAPERTA IPB
88.	Suhardadi	LSI IPB
89.	Ir. Sarwititi S. Agung, MS	PSW LP-IPB
90.	Drs. A.B. Ginting	PAM Gizi, Jakarta
91.	Dra. Aida Idris, MEd.	IKIP Jakarta
92.	Dr. Alex Paat Lic.PED	STF Driyarkara
93.	Ir. Anom Wiratnoyo	Insan Kamil
94.	Dra. Any Sutiadiningsih	IKIP Surabaya
95.	Ir. Triasih Djutaharta	LD-FEUI
96.	Avanti Fontana	LD-FEUI
97.	Drs. Benny Kodyat MPA	Depkes, Jakarta
98.	Prof.Drs. Bohar Soeharto	IKIP Bandung
99.	Drs. Chaerul Shaleh	Al Ihya
100.	Drs. E.B. Sitorus	Ditjen PMD, Bangdes
101.	Drs. Entis Sutisna	Insan Kamil
102.	Ir. Evy Nurvidya Arifin	LD, FE UI
103.	dr. Fasli Djalal, PHD	Bappenas
104.	Fitri Aini	ISIKKI Palembang
105.	Ir. Haidar Bagir, MA	Harian REPUBLIKA
106.	Dra. Hastaning Sakti	KSPKK Undip
107.	Dra. Irid Agus, MA.	Pus.Kajian Antar Budaya
108.	Dra. Ida Siti Herawati	PSW - IKIP Malang
109.	Drs. Idih Alfatih	Insan Kamil
110.	Jajah K. Husaini, SKM, MS	Puslitbang Gizi
111.	dr. Kartini Binol, MPH	WHO - Jakarta
112.	Kuniko Kishimoto, MA	Lembaga Studi Asia
113.	Dr. Kus Hardjanti	PKBI, Jakarta
114.	Ir. Laksmi Widajanti	FKM - UNDIP
115.	Dr. Lorens Bagus	Uniy.Tarumanegara
116.	Ir. Melati Pabittei, MS	Faperta UNHAS
117.	Dra. Murwatie B.Rahardjo	CSIS - Jakarta
118.	Drs. Pieter R. Nelwan, MA	Psikologi, UNPAD
119.	Dra. Ratna Wulan, SU	FakPsikologi, UGM
120.	drg. Sandra Fikawati	FKM, UI

NO.	N A M A	I N S T A N S I
121.	Prof.Dr. Saparinah Sadli	FakPsikologi,UI
122.	Dr. Sartini Nuryoto	FakPsikologi,UGM
123.	Prof.Dr. Selo Sumardjan	FISIP, UI
124.	Drs. Harun Umar	Kantor MenUPW
125.	Dra. Siti Hidayati Amal,MA	FISIP, UI
126.	Drs. Qusoy Kuswanto	SMKKN Bogor
127.	Drs. Soeprpto, SU	Fisipol, UGM
128.	Prof.Dr. Soekirman	Bappenas, Jakarta
129.	Dr. Sri Harjati Hatmadji	LD, FEUI
130.	Ir. Supardan	Asmen I MenUPW
131.	Dra. Sjamsiah Ahmad, MA	AsMen UPW
132.	Dra. Tien Supartinah	Ditjen PMD, Bangdes
133.	Dr. Thamrin A. Tomagola	Fisip, UI
134.	Ir. Tri Mumpuni	PDF Jakarta
135.	Tugiman Atmawinata,BA	PAM Gizi, Jakarta
136.	Y. Krisdinamurtirin,SKM	Puslitbang Gizi
137.	Dra. Aat Basmiati	Bappeda Kabupaten Bogor
138.	Djuriah, B.Sc.	Kadin Kesehatan Kodya, Bogor
139.	Ny. S. Marsaman	Tim Penggerak PKK Pusat.
140.	Ny. Sudikto	Tim Penggerak PKK Pusat.
141.	Ir. Syarifah Sofiah	Bappeda Kab. Bogor
142.	Ir. Trintrin T., MSc.	Puslitbang Gizi Depkes
143.	Dra. Darwina, MPIA	CPIS
144.	Ir. Deden H. Anwar	UPMMR - Deptan
145.	Ir. Mewa Ariani	PSE - Deptan
146.	dr. Susyanti Arno	Dinkes Kodya Bogor